

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KABUPATEN
NAGAN RAYA DALAM PEMILUKADA 2017**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

RAHMAT MULIA

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Jurusan Sosiologi Agama

NIM : 361303527



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH**

2018 M / 1439 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : RAHMAT MULIA
NIM : 361303527
Jenjang : Strata Satu (S1)
Jurusan/Prodi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 30 Januari 2018

Yang Menyatakan,



RAHMAT MULIA

NIM. 361303527

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KABUPATEN NAGAN
RAYA DALAM PEMILUKADA 2017**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Ushuluddin

Sosiologi Agama

Diajukan Oleh :

RAHMAT MULIA


Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Jurusan Sosiologi Agama


NIM : 361303527

Disetujui Oleh :

Pembimbing I


Dr. Mahmuddin, M.Si
NIP: 197210201997031002

Pembimbing II


Dr. Nurkhalis, S.Ag, M.Ag
NIP: 1973032622005011003


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat Prodi Sosiologi Agama.

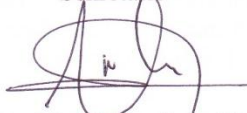
Pada Hari/ tanggal : Kamis, 08 Februari 2018 M
22 Jumadil Awal 1439 H

Di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

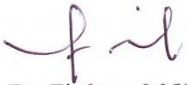
Ketua


Dr. Mahmuddin, M.Si
NIP: 197210201997031002

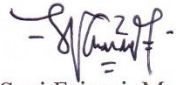
Sekretaris


Dr. Nurkhalis, S.Ag, M.Ag
NIP: 1973032622005011003

Penguji I


Dr. Firdaus, M.Hum. M.Si
NIP: 197707042007011023

Penguji II


Suci Fajarni, M.A
NIP:

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Dr. Lukman Hakim, M. Ag
NIP: 197506241999031001

Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Nagan Raya Dalam Pilkada 2017

Nama : Rahmat Mulia
Nim : 361303527
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Dr.Mahmuddin, M.Si
Pembimbing II : Dr. Nurkhalis, S.Ag, M.Ag

ABSTRAK

Skripsi ini memaparkan tentang perilaku masyarakat terhadap partisipasi politik dalam pilukada tahun 2017 di Desa Nigan Kabupaten Nagan Raya. Berangkat dari kecurigaan awal terhadap kecenderungan masyarakat dalam menghadapi pemilihan pemimpin daerah yang sering apatis dan condong tidak mau tahu jika tidak menguntungkan diri mereka sendiri, serta ditengarai adanya terjadi politik uang (*money politic*). Masalah dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana respon masyarakat Kabupaten Nagan Raya dalam pilukada 2017 dan faktor apa yang mempengaruhi partisipasi politik pada masyarakat desa Nigan Kabupaten Nagan Raya tersebut.

Adapun tujuan dan manfaat daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui respon masyarakat Nagan Raya dalam pilukada 2017 dan untuk mengetahui factor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Sedangkan manfaatnya adalah untuk memberikan kontribusi tentang seberapa jauh kesadaran masyarakat dalam kanvas perpolitikan dan menolak anggapan bahwa setiap masyarakat desa berpolitik karena dibayar atau terjadinya *money politic*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi politik. Lokasi penelitian yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang termasuk dalam daftar pemilih tetap desa Nigan kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa respon masyarakat desa Nigan Kabupaten Nagan Raya terhadap pilukada 2017 sangat baik. Hal itu dikuatkan dengan data yang menunjukkan hampir seluruh masyarakat menggunakan hak pilihnya. Sedangkan yang tidak memilih merupakan termasuk pada suara rusak dan orang tua lanjut usia yang tidak bisa atau tidak sanggup memilih karena faktor kesehatan.

Kata Kunci : Partisipasi, Politik, Desa Nigan, Nagan Raya

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat Nagan Raya Dalam Pemilukada 2017”**. Tidak lupa pula, selawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Karena dari berkat perjuangan beliau-lah kita telah di tuntunnya dari alam jahiliyah ke alam yang islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana (S1) pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimna pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Lukman Hakim, M.Ag selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
2. Bapak Sehat Ihsan Shadiqin, S.Pd.i, M.Ag, selaku ketua program studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Mahmuddin M.Si, sebagai pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam

proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

4. Bapak Nurkhalis SE, S.Ag, M.Ag, sebagai pembimbing II yang telah membantu dan memberi arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Abd Majid, M.Si selaku penasehat akademik sosiologi agama fakultas ushuluddin dan filsafat yang telah banyak membantu dan memberikan solusi akademik dari semester awal hingga akhir.
6. Seluruh dosen dan karyawan/karyawati program studi sosiologi agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
7. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada ayahanda tercinta Marhaban dan ibunda tercinta Radiyah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan oleh kedua orangtua.
8. Terimakasih juga buat sahabat-sahabat saya yang paling setia Nazuar Bugis, Ahlul Fitriadi, Aris Jufrizal, Rahmat idhar, Kausar Yuhdiansyah, Muhammad Arief Munandar, dan teman-teman seperjuangan di program study sosiologi agama angkatan 2013 yang telah memberi semangat dan dukungan kepada penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 27 Januari 2018

Rahmat mulia

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kajian Terdahulu.....	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : PARTISIPASI POLITIK DAN PILKADA	18
A. Pengertian Partisipasi Politik	18
B. Pola dan Bentuk Partisipasi Politik	23
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik	29
D. Perilaku dalam Pemilihan Kandidat	33
BAB III: PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DESA NIGAN KECAMATAN SEUNAGAN NAGAN RAYA.....	39
A. Gambaran Umum Desa Nigan Kabupaten Nagan Raya	39
B. Respon Politik Masyarakat Desa Nigan	49
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik di Desa Nigan	52
BAB IV: PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang yuridis pilkada langsung adalah UU No. 32 tahun 2004 sebagai revisi dari UU No. 22 Tahun 1999 yang memuat regulasi pilkada secara langsung. Seperti juga telah tertuang dalam pasal 18 ayat 4 UUD 1945, bahwa gubernur, bupati dan walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Hal itulah yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 bagian ke delapan tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam pasal 56 (1) UU No.32 tahun 2004 disebutkan bahwa: "Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil."¹ Tujuan utama pilkada langsung adalah penguatan masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas demokrasi di tingkat lokal dan peningkatan harga diri masyarakat yang sudah sekian lama dimarginalkan

Partisipasi politik yang merupakan wujud kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Apabila masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik dan praktik demokrasi di Indonesia akan berjalan dengan baik.

Salah satu indikator pilkada langsung yang berkualitas adalah pilkada yang membuka akses bagi setiap warga negara. Prinsip keterbukaan itu dikenal dengan

¹ [www.kopertis4.or.id/aturan/undang-undang Pemerintah dan daerah/No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah](http://www.kopertis4.or.id/aturan/undang-undang-Pemerintah-dan-daerah/No.32-tahun-2004-tentang-Pemerintahan-Daerah).

universal suffrage atau hak pilih universal. Akses yang terbuka berarti bahwa hak pilih benar-benar bersifat universal dan seluruh warga memiliki hak pilih yang sama. Bukanlah suatu kontradiksi bahwa di negara demokrasi seperti Indonesia, hak untuk memilih diatur dengan syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi, misal usia minimal, memiliki Kartu Tanda Penduduk, dan lain-lain.

Apabila jeli mencermati realitas di masyarakat Aceh, sebenarnya ada begitu banyak bagian dari masyarakat yang “merasa tidak punya kepentingan” dengan pemilu. Walau belum ada survey yang secara valid membuktikan kebenaran asumsi ini kenyataan di lapangan menunjukkan masyarakat yang ada, khususnya yang berada di Aceh apalagi bagian Barat-Selatan masih lebih banyak yang berkecukupan dengan isu-isu dasar kehidupan sehari-hari, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, naiknya harga-harga, masalah kesehatan yang terus mahal, serta berbagai isu-isu kemasyarakatan yang umumnya berputar tidak jauh dari persoalan tadi.

Sebenarnya sangat diperlukan untuk menjajaki sejauh mana tingkat realitas masyarakat yang ada dalam menyikapi pemilukada yang secara langsung mencari sosok pemimpin di Aceh. Dalam konteks penjajakan tersebut, perlu dibandingkan berapa banyak masyarakat yang optimis terhadap perubahan yang dimulai dari pemilukada atau mereka yang pesimis terhadap pemilukada bupati Nagan Raya. Di lapangan kita lebih mudah bertemu dengan orang yang pesimis atau minimal tidak mau tahu dengan pemilukada ini dibanding jika kita menemukan orang yang optimis perubahan akan bergulir dari pemilukada yang terselenggara.

Bagi mereka yang optimis, meyakini bahwa pilbup (pemilihan bupati) akan

menghasilkan banyak perubahan, mulai dari penguasa yang berganti, yang juga akan berimbas pada perubahan tatanan sistem yang ada. Di antara yang optimis juga tumbuh harapan, bahkan tak sedikit yang yakin bahwa pemilukada merupakan jalan satu-satunya untuk melakukan perubahan. Berbagai persoalan yang ada selama ini terjadi diharapkan akan ada titik terang melalui pilbub yang melahirkan seorang bupati atau kepala daerah. Apa yang dihasilkan benar-benar merupakan aspirasi rakyat. Dengan demikian, pemilukada saat ini diharapkan mampu memberikan perubahan yang signifikan bagi kehidupan masyarakat.

Sebaliknya, mereka yang memiliki pandangan pesimis berasumsi bahwa ada atau tidak ada pemilukada, persoalan-persoalan yang ada sudah terlanjur menjadi kompleks, artinya faktor bupati dan wakil bupati baru tidak lantas mampu menyelesaikan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat. Asumsi yang kuat muncul terhadap “tidak signifikannya” faktor bupati akan menjamin berlangsungnya perubahan. Apalagi ketika para pengikut asumsi pesimis melihat daerah-daerah lain yang telah melangsungkan pemilukada, kemudian mendapatkan sosok bupati baru yang didukung rakyat juga tidak bisa berbuat banyak. Walau kapasitas pribadi bupati cukup memadai sekalipun, rakyat kadang tetap saja belum yakin jika bupati yang mereka pilih punya keberanian menegakkan aturan main yang tegas terhadap sejumlah permasalahan yang terjadi.

Perwujudan demokrasi di tingkat lokal, salah satunya adalah dengan melaksanakan pemilukada di daerah-daerah. Sebagaimana pesta demokrasi di kabupaten Nagan Raya yang di laksanakan pada tahun 2017 lalu. Namun, tidak semua perwujudan demokrasi itu berjalan dengan lancar. Masih banyak polemik

mengenai masyarakat bawah yang dapat mempengaruhi proses pemilihan. Kecenderungan masyarakat terhadap uang (*money politic*) dapat berdampak pada menurunnya tingkat partisipasi masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya. Sehingga ketika tidak ada uang, maka golput akan menjadi suara mayoritas.

Hal ini sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah Aceh menurut informasi dan kabar yang beredar dalam masa pemilu. Meskipun tidak dapat dipertanggung jawabkan hipotesa tersebut, namun pada lazimnya kebanyakan masyarakat desa yang dalam sehari-harinya hanya bertani dan berkebun cenderung apatis terhadap politik. Dalam artian kesadaran politik mereka masih terlihat rendah. Sehingga hal ini mengarahkan pada praktik *money politic*, di mana calon yang memberikan uang lebih banyak, maka itulah yang dipilih. Dan jika tidak ada calon yang memberikan uang, mereka lebih memilih golput.²

Fenomena yang demikian, tentu akan berdampak atau berpengaruh terhadap tinggi rendahnya masyarakat di Desa Nigan dalam pemilukada Kabupaten Nagan Raya. Oleh karena itu, partisipasi mereka sangat penting untuk ditilik guna untuk mengetahui seberapa jauh partisipasi mereka dalam mengawal pemilukada kabupaten nagan raya. Kesadaran politik yang tinggi tentunya sangat diharapkan. Jika partisipasi mereka tinggi maka kesadaran politik mereka juga tinggi, namun jika partisipasi mereka rendah, tentunya kesadaran politik mereka juga rendah.

Untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik masyarakat di Desa Nigan Kabupaten Nagan Raya dalam pilkada 2017. Maka perlu diadakan penelitian khusus mengenai hal tersebut. Penulis mengangkat penelitian ini dengan judul **“Partisipasi**

² Hasil observasi pada media massa terkait pelaksanaan pemilu yang di warnai dengan *money politic*.

Politik Masyarakat Kabupaten Nagan Raya Dalam Pilkada 2017". Yang membuat penulis tertarik mengangkat judul ini adalah karena masyarakat Desa Nigan Kabupaten Nagan Raya cenderung pekerjaan mereka juga bertani dan berkebun, namun partisipasi politiknya bagus.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang tersebut, maka batasan masalah yang penulis ajukan adalah: Bagaimana partisipasi politik masyarakat desa Nigan Kabupaten Nagan Raya dalam pilkada 2017 ?

Adapun pertanyaan-pertanyaan untuk menunjang rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana respon masyarakat Kabupaten Nagan Raya dalam pilkada 2017?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat desa Nigan Kabupaten Nagan Raya dalam pilkada 2017?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat desa Nigan Kabupaten Nagan Raya dalam pilkada 2017.
- b. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat desa Nigan Kabupaten Nagan Raya dalam pilkada 2017

2. Kegunaan penelitian

- a. Memberikan gambaran bagaimana partisipasi politik masyarakat desa Nigan Kabupaten Nagan Raya dalam pilkada 2017.
- b. Untuk memberikan kontribusi seberapa jauh kesadaran politik masyarakat desa Nigan Kabupaten Nagan Raya dalam pilkada 2017.
- c. Sebagai bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan partisipasi politik masyarakat desa nigan, terlebih-lebih semua masyarakat kabupaten nagan raya pada penyelenggaraan pemilukada kabupaten Nagan raya di masa mendatang.

D. KAJIAN PUSTAKA

Dalam kajian ini kepustakaan, penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema yang penulis ambil yaitu :

Karya-karya yang berbentuk buku yang penulis telusuri di antaranya:

Pertama, karya Miriam Budiardjo dengan judul "*Partisipasi Politik*". Buku ini menjelaskan tentang pengertian partisipasi politik secara panjang lebar namun mudah dipahami oleh setiap kalangan. Dalam buku ini menyinggung bahwa kesadaran politik yang tinggi akan sangat berpengaruh pada tingkat partisipasi politik seseorang.³

Kedua, karya Miriam Budiardjo dengan judul "*Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*". Buku ini membahas tentang cara-cara berpartisipasi,

³ Miriam Budiardjo, *Partisipasi Politik*, (Jakarta:PT Gramedia,1998).

bagaimana hubungan partisipasi politik dengan partai politik. Buku ini juga membahas tentang partisipasi politik dalam konteks pembangunan.⁴

Ketiga, karya Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dengan judul “*Partisipasi Politik di Negara Berkembang*”. Dalam buku ini mengkaji tentang bagaimana bentuk partisipasi politik di negara-negara berkembang seperti, Amerika Serikat, India, atau pun di negara-negara Eropa. Buku terjemahan ini termasuk buku rujukan tentang segala sesuatu yang menyangkut segala sistem dan alur politik yang terjadi di negara-negara berkembang, dikaji lugas dan jelas segala sesuatu baik buruknya.⁵

Penulis juga menemukan beberapa hasil penelitian mengenai partisipasi politik, diantaranya adalah :

Penelitian Omta Purba dengan judul “*Hubungan Tingkat Kesadaran Politik dengan partisipasi politik masyarakat pada kegiatan Pemilu 2010 di kelurahan Timbangan kecamatan Inderalaya Utara Kabupaten Ogan Ilir*”. Penelitian ini menjelaskan tentang tingkat kesadaran politik di kelurahan Timbangan, bagaimana partisipasi politik masyarakat pada kegiatan pemilu 2010 di kelurahan Timbangan, adakah hubungan tingkat kesadaran politik. Dengan partisipasi politik masyarakat pada kegiatan pemilu 2010 di kelurahan Timbangan⁶.

Penelitian Marlina Tarigan, dengan judul “*partisipasi masyarakat kabupaten Tamanggung dalam pelaksanaan pilkada tahun 2008*”. Penelitian ini berbentuk tesis

⁴ Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan partai politik sebuah bunga rampai*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1998).

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).

⁶ Omta Purba, “*Hubungan Tingkat Kesadaran Politik dengan partisipasi politik masyarakat pada kegiatan Pemilu 2010 di kelurahan Timbangan kecamatan Inderalaya Utara Kabupaten Ogan Ilir*”. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya).

tugas akhir. Dalam penelitian ini menyoroti masalah partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan maksud untuk penjelasan. Sasaran dalam penelitian ini adalah pemilih di kabupaten tamanggung. Teknik pengambilan sampel adalah menggunakan sampel acak 2 cabang yang menggabungkan sistem acak dan sistem acak proporsional. Adapun jumlah responden adalah 243 orang yang tersebar di 20 kecamatan se-kabupaten tamanggung.⁷

Penelitian Anis Pujining Rahayu, dengan judul, “*partisipasi politik masyarakat dalam pilkada(2008) kota Malang*”. Penelitian ini berbentuk skripsi jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Malang.⁸

Dari buku-buku yang penulis sebutkan di atas beserta penelitian-penelitian yang telah dilakukan, penulis belum menemukan adanya penelitian ilmiah yang mengkaji dengan mendalam tentang “Partisipasi Politik Masyarakat Kab. Nagan Raya Dalam Pemilukada tahun 2017”. Maka penulis mengangkat judul skripsi tersebut untuk dikaji lebih mendalam.

⁷ Marlina Tarigan, “*Partisipasi masyarakat kabupaten Tamanggung dalam pelaksanaan pilkada tahun 2008*” (Program studi magister ilmu politik, Program pasca sarjana Universitas Deponogoro Semarang, 2009).

⁸ Anis Pujining Rahayu, “*Partisipasi politik masyarakat dalam pilkada(2008) kota Malang*”. (jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2009).

E. Kerangka Teori

1. Teori partisipasi politik

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi. Partisipasi merupakan taraf partisipasi warga masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik baik itu yang bersifat aktif maupun pasif dan juga yang bersifat langsung maupun tidak langsung guna untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Pada abad ke 14, hak untuk berpartisipasi dalam hal pembuatan keputusan politik, untuk memberi suara, atau menduduki jabatan pemerintah telah dibatasi hanya untuk kelompok kecil orang yang berkuasa, kaya dan orang-orang yang terpandang.⁹ Kecenderungan kearah partisipasi rakyat yang lebih luas dalam politik bermula pada masa renaissance dan reformasi abad ke 15 sampai abad ke 17, abad 18 dan 19. Tetapi cara-cara bagaimana berbagai golongan masyarakat (pedagang,tukang,orang-orang profesional,buruh kota,wiraswasta industri,petani desa dan sebagainya),menuntut hak mereka untuk berpartisipasi lebih luas dalam pembuatan keputusan politik sangat berbeda di berbagai negara¹⁰.

Menurut Myron Weiner seperti dikutip oleh Mas'ood. Paling tidak terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik.

1. Modernisasi

Ketika penduduk kota baru (yaitu buruh dan pedagang, kaum profesional) melakukan komersialisasi pertanian, industrialisasi, urbanisasi yang meningkat, penyebaran kepandaian baca tulis,perbaikan pendidikan, dan pengembangan media

⁹ Mas'ood, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), 45.

¹⁰ *Ibid*, 45.

massa, mereka merasa dapat mempengaruhi nasib mereka sendiri, makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.

2. Perubahan-Perubahan Struktural Kelas Sosial

Begitu terbentuk suatu kelas kerja terbaru dan kelas menengah yang meluas dan berubah selama proses industrialisasi dan modernisasi, masalah tentang siapa yang berhak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik.

3. Pengaruh Kaum Intelektual dan Komunikasi Massa Modern

Kaum intelektual (sarjana, filosof, pengarang, wartawan) sering mengemukakan ide-ide seperti egaliterisme dan nasionalisme kepada masyarakat untuk membangkitkan tuntutan akan partisipasi massa yang luas dalam pembuatan keputusan politik. Sistem –sistem transportasi dan komunikasi modern memudahkan dan mempercepat penyebaran ide-ide baru.

4. Konflik di antara Kelompok-Kelompok Pemimpin Politik

Kalau timbul kompetisi memperebutkan kekuasaan, strategi yang biasa digunakan oleh kelompok-kelompok yang saling berhadapan adalah mencari dukungan rakyat. Dalam hal ini mereka menganggap sah dan memperjuangkan ide-ide partisipasi massa dan akibatnya menimbulkan gerakan-gerakan yang menuntut agar “hak-hak” ini dapat dipenuhi. Jadi kelas-kelas menengah dalam perjuangannya melawan kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.

5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan

Perluasan kegiatan pemerintah dalam bidang-bidang kebijaksanaan baru biasanya berarti bahwa konsekuensi dan tindakan-tindakan pemerintah menjadi semakin menyusup di kehidupan sehari-hari rakyat. Tanpa hak-hak yang sah atas partisipasi politik, individu-individu betul-betul tidak berdaya dalam menghadapi dan dengan mudah dapat di pengaruhi oleh tindakan-tindakan pemerintah yang mungkin dapat merugikan kepentingannya. Maka dari itu, meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik¹¹.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang terjun langsung ke lokasi Desa Nigan Kec. Seunagan Kabupaten Nagan Raya yang menjadi objek kajian penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena hasil yang diharapkan lebih kepada untuk mengetahui adanya peran partisipasi aktif pada masyarakat Desa Nigan yang menunjukkan kualitas masyarakatnya, bukan kepada kuantitas atau jumlah mereka.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *Sosiologi politik*, yaitu pendekatan yang lebih mengukur atau menilai sosial politik masyarakat Desa

¹¹A.A. Said Gatara, Mohd. Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik: konsep dan dinamika perkembangan kajian*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), 90

Nigan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan bantuan teori yang sesuai atau yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Lokasi penelitian

Dalam suatu penelitian, menentukan suatu individu atau kelompok yang menjadi objek dalam penelitian itu sendiri sangatlah penting. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat Desa Nigan Kec. Seunagan Kabupaten Nagan Raya yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer.

Sumber data primer yaitu sumber utama yang dijadikan bahan penelitian lapangan, maka yang menjadi sumber utama adalah hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan masyarakat desa Nigan Kabupaten Nagan Raya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber primer. Sumber sekunder ini didapatkan dari buku-buku, artikel, serta sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi atau pengamatan.

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹² Adapun teknik yang digunakan adalah observasi langsung (*direct observation*), seperti yang diungkapkan Pabundu Tika, bahwa: “Observasi langsung adalah pengamatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada pada objek yang diteliti”.¹³ Namun demikian peneliti juga menggunakan teknik observasi terlibat (*partisipant observation*),¹⁴ yaitu pengamatan yang dilakukan dengan cara ikut mengambil bagian atau melibatkan diri dengan aktivitas objek yang diamati. Yang di observasi pada penelitian ini adalah pemahaman, perilaku dan tindakan masyarakat desa Nigan Kabupaten Nagan Raya dalam pilkada 2017.

b. Wawancara (*interview*).

Proses memperoleh data dengan menggunakan serangkaian tanya jawab secara tatap muka, antara penulis dengan responden untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Adapun teknik yang digunakan

¹²Sanafiah Faisal, Mulyadi Guntur W, *Metodologi Penelitian dan Pendidikan*, terj. John W. Best, *Research in Education*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 119

¹³Moh. Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: BumiAksara, 2006), 58

¹⁴Rusdin Pohan, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Rijal Institute, 2007),

adalah wawancara campuran atau kombinasi antara wawancara berstruktur dan tidak berstruktur. Wawancara campuran adalah pewawancara membuat daftar pertanyaan yang akan disajikan, tetapi cara pengajuan pertanyaan-pertanyaan, diserahkan kepada kebijaksanaan pewawancara itu sendiri.¹⁵ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang telah mengikuti pemilu pada 2017. Peneliti mewawancarai responden dengan pertanyaan yang telah disiapkan tentang bagaimana reaksi dan tindakan dalam mengikuti pemilu. Responden yang akan diwawancarai terdiri dari beberapa orang dari Desa Nigan Kec. Seunagan Kabupaten Nagan Raya, baik itu dari kalangan anggota partai, aparat gampong, KIP, dan masyarakat biasa.

c. Telaah dokumentasi.

Dokumentasi yang digunakan yaitu dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.¹⁶ Telaah dokumentasi salah satu teknik penting dalam suatu penelitian dengan mengumpulkan informasi yang telah ada pada objek terkait. Penulis menggali informasi dengan mencari data-data pendukung mengenai penelitian ini seperti pengertian partisipasi politik, pola dan bentuk partisipasi yang dimaksud, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya dan perilaku pemilih dalam memilih kandidat.

¹⁵ Moh.PabunduTika, *Metodelogi Riset...*, 63

¹⁶Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 135

6. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dianalisis dalam rangka menemukan makna temuan. Lexy J. Moleong, analisis data ialah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁷

Data yang ditemukan terdiri dari catatan lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan telaah dokumentasi dianalisis terlebih dahulu agar dapat diketahui maknanya dengan menyusun data, menghubungkan data, mereduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini adalah termasuk pola penelitian kualitatif, maka untuk mengolah data penulis menggunakan teorinya Miles dan Huberman yaitu: reduksi data, display data dan verifikasi data.¹⁸ Teknik pengolahan data dan penafsiran data tersebut dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.¹⁹ Penulis menelaah kembali seluruh catatan yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan telaah dokumentasi.

¹⁷Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 10

¹⁸Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohindi, (Jakarta: UI Pers, 1992), 15

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2002),

Data yang diperoleh disusun dalam satuan-satuan yang teratur dengan cara meringkas dan memilih, mencari sesuai tipe, urutan dan pola.

b. Penyajian data

Miles dan Huberman mengatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam proses penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.²⁰ Penulis merangkum hal-hal pokok dan kemudian penulis menyusun dalam bentuk deskriptif yang naratif dan sistematis sehingga dapat memudahkan untuk mencari tema sentral tentang partisipasi politik masyarakat desa Nigan Kabupaten Nagan Raya dalam pilkada 2017 sesuai dengan fokus atau rumusan masalah. Data yang sudah direduksi dan diklasifikasikan berdasarkan kelompok masalah yang diteliti dapat memudahkan untuk menarik kesimpulan.

c. Menarik kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.²¹ Makna-makna yang muncul dari data harus diuji validitasnya. Peneliti pada tahap ini mencoba menarik kesimpulan berdasarkan tema untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan.

²⁰Sugiano, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 95

²¹Sugiano, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 99

7. Teknik Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan teknik penulisan berdasarkan buku *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry* yang diterbitkan oleh Ushuluddin Publishing Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh tahun 2013 M/1434 H.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan membaca penelitian ini, penulis menyusun skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I, Pendahuluan; yang meliputi gambaran dari keseluruhan skripsi, yaitu: meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka pikir, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II, Dalam bab dua ini sebagai landasan teori berisi masalah yang berkaitan dengan data yang hendak dikumpulkan, meliputi; Pengertian Partisipasi politik, pola dan bentuk partisipasi politik, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, dan perilaku memilih.

Bab III, menjelaskan gambaran lokasi penelitian, yaitu tentang kondisi umum desa Nigan Kec. Seunagan Kabupaten Nagan Raya, Kemudian menjabarkan respon politik masyarakat Desa Nigan dan menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik di Desa Nigan.

Bab IV, adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran.

BAB II

PARTISIPASI POLITIK DAN PEMILUKADA

A. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara dalam membuat keputusan, melaksanakan keputusan, mempengaruhi proses pengambilan keputusan, mempengaruhi kebijakan pemerintah termasuk yang berkaitan dengan keterlibatan aktif maupun keterlibatan pasif setiap individu dalam hierarki sistem politik.¹

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Secara umum masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan dan mempengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Modernisasi telah menghasilkan partisipasi politik yang meluas. Partisipasi politik itu merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.²

Konsep partisipasi politik (*polytical participation*) secara singkat dan gamblang dapat dipahami sebagai keikutsertaan warga negara dalam proses-proses politik secara sukarela.³

Kata warga negara di sini merujuk pada individu atau mungkin kelompok-

¹ Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), 67

² *Ibid.*

³ Pawito, *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan*, (Yogyakarta: Unname, 2009), 26

kelompok dalam masyarakat yang bukan orang-orang yang duduk dalam lembaga-lembaga resmi seperti parlemen, jaksa, atau hakim. Kemudian keikutsertaan dalam proses politik pada dasarnya adalah upaya memberikan tanggapan, saran, atau mengemukakan aspirasi-aspirasi atau tuntutan-tuntutan yang berkenaan dengan penjatahan sumber daya publik. Karena itu partisipasi politik memiliki karakter pokok bahwa keikutsertaannya didasarkan pada prinsip sukarela bukan paksaan.

Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau *lobby* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan aksi langsung dan sebagainya.

Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat: Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (*Istilah partisipasi politik akan mengacu pada kegiatan sukarela dimana anggota masyarakat berbagi dalam pemilihan penguasa dan, secara langsung atau tidak langsung, dalam pembentukan kebijakan publik*).⁴

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 367

Hal yang paling disoroti adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, sekalipun fokus utamanya lebih luas tetapi abstrak, yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat.

Sedangkan menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam *Handbook of Political Science*: Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.⁵

Dalam hubungan dengan negara-negara baru Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* memberi penafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.⁶

Di negara-negara demokrasi, konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu, dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang kursi pimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan wujud dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh masyarakat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik seperti

⁵ Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013), hlm. 2

⁶ Miriam Budiardjo *Partisipasi dan Partai Politik*.... 368.

memberikan suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan tersebut kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari yang berwenang untuk membuat keputusan mengikat. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik.

Partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Perasaan kesadaran tersebut sering dijumpai terutama dari orang yang berpendidikan, yang kehidupannya lebih baik, dan orang-orang terkemuka. Di negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah umumnya dianggap kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian pada masalah kenegaraan.⁷

Selain itu para sarjana yang mengamati masyarakat demokrasi barat juga cenderung berpendapat bahwa yang dinamakan partisipasi politik hanya terbatas pada kegiatan sukarela saja, yaitu kegiatan yang dilakukan tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun. Akan tetapi, beberapa sarjana yang banyak mempelajari negara-negara komunis dan berbagai negara berkembang cenderung berpendapat bahwa kegiatan yang tidak sukarela pun tercakup, karena sukar sekali untuk membedakan antara kegiatan yang benar-benar sukarela dan kegiatan yang dipaksakan secara terselubung, baik oleh penguasa maupun oleh kelompok lain.

⁷ Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik...*, 57.

Huntington dan Nelson membedakan partisipasi yaitu bersifat otonom dan partisipasi yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain (*mobilized participation*)⁸.

Ada pula pendapat bahwa partisipasi politik hanya mencakup kegiatan yang bersifat positif. Akan tetapi, Huntington dan Nelson menganggap bahwa kegiatan yang ada unsur destruktifnya seperti demonstrasi, terror, pembunuhan politik, dan lain-lain, merupakan suatu bentuk partisipasi.

Pendapat Huntington dan Nelson dibatasi oleh beberapa hal: pertama, menurut mereka partisipasi politik hanyalah mencakup kegiatan-kegiatan dan bukan sikap-sikap. Dalam hal ini, mereka tidak memasukkan komponen-komponen subjektif seperti pengetahuan tentang politik, minat terhadap politik, perasaan-perasaan mengenai politik, serta keefektifan politik, tetapi lebih ditekankan pada bagaimana sikap dan perasaan tersebut berkaitan dengan bentuk tindakan politik.

Kedua, yang dimaksudkan dalam partisipasi politik itu adalah warga negara biasa, bukan pejabat-pejabat pemerintah. Ketiga, kegiatan partisipasi politik itu hanyalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, terlepas apakah itu legal atau tidak, seperti demonstrasi, kekerasan, bahkan pemberontakan. Keempat, partisipasi politik juga mencakup semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, baik efektif atau tidak, berhasil atau gagal. Kelima, partisipasi politik berupa kegiatan mempengaruhi pemerintah yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Langsung artinya tanpa perantara, sedangkan tidak langsung melalui orang-orang yang dianggap dapat menyalurkan kepada pemerintah.

⁸ Miriam Budiarto *Partisipasi dan Partai Politik...*, 368

B. Pola dan Bentuk Partisipasi Politik

Ada beberapa pola dan bentuk partisipasi dalam berpolitik. Miriam Budiarmo menyebutnya sebagai bentuk piramida. Piramida pola partisipasi dibedakan menjadi dua. Piramida partisipasi I menurut Milbrath dan Goel, memperlihatkan bahwa masyarakat dibagi dalam tiga kategori: a. pemain, b. penonton, c. apatis.⁹ Pemain (*gladiators*) yaitu orang yang sangat aktif dalam dunia politik, penonton (*spectators*) termasuk populasi yang aktif secara minimal, termasuk menggunakan hak pilihnya. Sedangkan apatis yaitu orang yang tidak aktif sama sekali, termasuk tidak menggunakan hak pilihnya. Dalam buku lain disebutkan yang keempat adalah pengkritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.¹⁰ Yang di maksud tidak konvensional di sini, para pengkritik tersebut adalah individu atau kelompok yang tidak aktif sebagai pelaku atau sebagai pemilih namun selalu memberikan kritik, baik itu membangun atau tidak. Mereka tidak apatis, tapi dalam situasi tertentu lebih berbahaya dari apatis.

Piramida partisipasi politik II, menurut David F Roth dan Frank L. Wilson, melihat masyarakat terbagi dalam empat kategori: a. aktivis (*activists*), b. partisipan (*participants*), c. penonton (*onlookers*), d. Apolitis (*apoliticals*).¹¹ Aktivis (*Activists*) terdiri atas pejabat publik atau calon pejabat publik, fungsionaris partai politik, pimpinan kelompok kepentingan. Partisipan terdiri dari orang yang bekerja untuk kampanye, anggota partai secara aktif, partisipan aktif dalam kelompok kepentingan dan tindakan-tindakan yang bersifat politis, serta orang yang terlibat dalam komunitas proyek. Sedangkan penonton (*onlookers*) adalah orang yang menghadiri

⁹ Miriam Budiarmo *Partisipasi dan Partai Politik...*, 370

¹⁰ Sudjono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, (Semarang: IKIP Semarang, 1995), 75

¹¹ Miriam Budiarmo *Partisipasi dan Partai Politik...*, 372

reli-reli politik, anggota dalam kelompok kepentingan, *pe-lobby*, pemilih, orang-orang yang terlibat dalam diskusi politik, serta pemerhati dalam pembangunan politik.

Abramson dan Hardwick membedakan partisipasi politik menjadi dua jenis, yaitu konvensional dan tidak konvensional.¹² Bentuk partisipasi politik konvensional dalam pemilihan umum misalnya adalah memberikan suara dalam pemilu, ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan kampanye, bergabung dalam kelompok kepentingan tertentu, melakukan lobi-lobi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, serta menjadi kandidat. Bentuk partisipasi politik yang paling lazim terjadi di negara-negara demokratis yaitu memberikan suara dalam pemilihan umum baik di tingkat nasional maupun daerah.

Dalam hal ini, memberikan suara dalam pemilihan umum berarti menyatakan dukungan terhadap partai atau kandidat tertentu dan menolak partai atau kandidat lain yang sedang berkompetisi. Ketika pilihan atau suara yang diberikan pada pemilihan sekarang berubah dari pilihan pada pemilihan sebelumnya, berarti pemilih memberikan dukungan terhadap sistem yang sedang berlangsung, serta menginginkan perubahan secara demokratis dan elegan.

Bentuk partisipasi politik konvensional lain yang lebih aktif antara lain adalah ikut ambil bagian dalam kegiatan kampanye, bergabung dalam tim sukses, dan menyumbang dana, karena bentuk partisipasi politik ini berperan lebih aktif dalam memperjuangkan keinginan atau tuntutan. Bentuk yang paling aktif adalah ikut berkompetisi dengan menjadi kandidat, karena keikutsertaannya dalam proses politik

¹² Pawito, *Komunikasi Politik...*, 223

nyaris sempurna karena kandidat harus mengeluarkan dana untuk pencalonan dan kampanye, harus terjun langsung dalam kegiatan-kegiatan kampanye untuk mempengaruhi orang lain agar memberikan dukungan, melakukan lobi-lobi untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu, termasuk melobi penyandang dana serta kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi tertentu. Partisipasi politik tidak hanya terbatas pada konteks pemilihan.

Ada beberapa bentuk partisipasi politik konvensional lain yang sering dijumpai, antara lain: aktif mencari informasi mengenai berbagai persoalan politik, menulis surat pembaca yang berisi penilaian-penilaian atau saran-saran mengenai berbagai persoalan politik untuk dipublikasikan di surat kabar atau majalah, mendatangi pejabat lokal untuk menyampaikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan, dan menulis petisi untuk memperjuangkan tuntutan-tuntutan.

Dalam arti non-konvensional, partisipasi politik mencakup berbagai kegiatan yang cenderung melibatkan banyak orang dalam suatu bentuk kelompok massa dan kadang disertai dengan pelanggaran tertib hukum dan kekerasan. Partisipasi politik non-konvensional dapat diterima secara luas apabila tidak disertai aksi pengrusakan atau kekerasan, seperti misalnya aksi protes dengan cara berpawai seraya membawa spanduk dan poster yang berisi tentang berbagai tuntutan, mengkoordinasikan aksi pemogokan di kalangan buruh atau menuntut kenaikan upah, perbaikan kondisi kerja, dan peningkatan jamisan sosial.¹³

Mengenai partisipasi politik, Hardwick mengatakan sebagai berikut: "*cara-cara dengan mana warga negara berinteraksi dengan pemerintah. Melalui*

¹³ Miriam Budiarto *Partisipasi dan Partai Politik...*, 374

*partisipasi secara aktif dalam pemerintah, warga negara berupaya untuk membawa kepentingan-kepentingannya ke pejabat-pejabat publik agar kebutuhan-kebutuhannya dapat terpenuhi.*¹⁴

Berbagai pengamatan menunjukkan bahwa jika dilihat dari segi partisipasi politik konvensional, setidaknya terdapat tiga alasan penting mengapa seseorang ikut mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan partisipasi politik. Ketiga alasan tersebut adalah a) untuk mengkomunikasikan tuntutan atau aspirasi, b) untuk lebih memantapkan upaya pencapaian tujuan dari sistem politik yang ada, c) untuk menunjukkan dukungan terhadap sistem politik beserta para pemimpin atau elite politik yang ada. Ketiga alasan tersebut saling berkaitan sama lain. Seseorang kadang merasa tidak puas dengan kinerja partai atau kandidat tertentu, maka ia kemudian memberikan suara kepada partai atau kandidat lain dalam pemilihan. Hal tersebut berarti bahwa orang yang bersangkutan mengkomunikasikan aspirasi atau keinginan sekaligus juga memantapkan pencapaian tujuan sistem karena sistem politik pada umumnya dikembangkan antara lain untuk terselenggaranya proses-proses politik dengan mekanisme yang adil dan wajar. Pada saat yang sama hal demikian juga menunjukkan dukungan orang bersangkutan terhadap elite politik tertentu dengan memberikan suara kepadanya.

Sebagaimana telah dikemukakan, kegiatan aksi protes atau demonstrasi sampai tingkat tertentu dapat diterima secara luas sebagai bentuk partisipasi politik dalam masyarakat demokratis. Di Indonesia, aksi protes atau demonstrasi seringkali disertai dengan kekerasan dan pengrusakan yang justru tidak sesuai dengan hakekat

¹⁴ Pawito, *Komunikasi Politik...*, 51

demokrasi. Orang-orang yang memberikan suara dan berdemonstrasi tampaknya merupakan bentuk nyata partisipasi politik, tetapi seringkali tindakan mereka tidak didasarkan atas motivasi atau niat pribadi pelaku-pelakunya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Banyaknya personal yang berdemonstrasi ataupun membanjiri tempat pemungutan suara tersebut digerakkan oleh majikan mereka, yang apabila tidak menuruti akan mengancam pekerjaan yang berpengaruh pada masa depan mereka. Karena itu mereka tidak sadar bahwa tindakan yang dilakukan itu akan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kontribusi partisipasi politik tidak dapat disamaratakan dalam semua sistem politik. Sistem politik yang satu lebih menekankan arti pentingnya partisipasi politik dari yang lain dalam sebuah sistem politik yang berbeda, meskipun perbedaannya tidaklah selalu formal. Dalam masyarakat yang primitif yang politiknya cenderung terintegrasi dengan kegiatan masyarakat, umumnya partisipasinya cenderung tinggi bahkan mungkin sulit untuk dibedakan dari kegiatan lain. Di pihak lain, dalam masyarakat yang saling berhubungan karena adanya komunikasi dan institusi, pengaruh modern, dan tradisional, partisipasinya mungkin telah dibatasi oleh faktor-faktor seperti melek huruf, dan masalah-masalah umum komunikasi.¹⁵

Sebagai suatu kegiatan, partisipasi dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif mencakup kegiatan warga negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternative kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk

¹⁵ Pawito, *Komunikasi Politik...*, 52

meluruskan kebijaksanaan, membayar pajak, dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan pimpinan pemerintah. Di pihak lain partisipasipasif antara lain berupa kegiatan mentaati peraturan, menerima dan melaksanakan keputusan pemerintah.¹⁶

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa orientasi partisipasi aktif terletak pada masukan dan keluaran politik, sedangkan partisipasi pasif hanya terletak pada keluaran politiknya saja. Jika partisipasi politik hanya dianggap sebagai variabel yang homogen dan sederhana, maka pola-pola partisipasi politik tidak dapat dipahami sebab-sebab dan konsekuensinya. Hal itu disadari bahwa dalam bentuk dan pola-pola partisipasi politik terdapat banyak hal yang mempengaruhi timbulnya dorongan ke arah partisipasi politik masyarakat. Sulit untuk disimpulkan bahwa masyarakat tertentu memiliki partisipasi yang tinggi atau rendah, sebab tiap-tiap bentuk partisipasi itu memiliki latar belakang sebab dan konsekuensi-konsekuensi, serta arah pengembangan yang berbeda-beda. Barangkali dalam kerangka umum saja dapat ditarik pola umum bahwa seseorang memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dari orang lain. Hal itu berdasarkan aktivitas dan perilaku yang tampak yang dilakukan oleh orang tersebut. Dengan demikian persoalan partisipasi tidak saja persoalan tinggi rendahnya partisipasi, tetapi juga menyangkut variabel-variabel lain yang mempengaruhi seperti latar belakang munculnya partisipasi ke arah pembangunan, konsekuensi-konsekuensi, dan pola partisipasi itu sendiri.

¹⁶ Pawito, *Komunikasi Politik...*, 55

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik

Partisipasi politik masyarakat memiliki perbedaan dalam intensitas dan bentuknya. Hal itu di samping berkaitan dengan sistem politik, juga berhubungan dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Weimer, terdapat lima hal yang dapat mempengaruhi partisipasi politik yang lebih luas.¹⁷ Pertama adalah modernisasi. Modernisasi di segala bidang berimplikasi pada komersialisasi pertanian, industrialisasi, meningkatnya arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan, dan pengembangan media massa/media komunikasi secara lebih luas. Kemajuan itu berakibat pada partisipasi warga kota baru seperti kaum buruh, pedagang, dan profesional untuk ikut serta mempengaruhi kebijakan dan menuntut keikutsertaannya dalam kekuasaan politik sebagai bentuk kesadarannya bahwa mereka pun dapat mempengaruhi nasibnya sendiri. Faktor kedua adalah terjadinya perubahan dalam struktur kelas sosial. Perubahan struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang makin meluas dalam era industrialisasi dan modernisasi, sehingga membawa perubahan dalam pola partisipasi politik.

Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa merupakan faktor partisipasi politik masyarakat. Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, dan egaliterisme membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Komunikasi yang meluas mempermudah penyebaran ide-ide itu ke seluruh lapisan masyarakat. Hal itu berimplikasi pada tuntutan rakyat

¹⁷ Sudjono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik...*, 89

dalam ikut serta mempengaruhi kebijakan pemerintah. Faktor keempat adalah adanya konflik di antara pemimpin-pemimpin politik.

Pemimpin politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan seringkali dilakukan dengan cara mencari dukungan massa. Implikasinya adalah munculnya tuntutan terhadap hak-hak rakyat, sehingga pertentangan dan perjuangan kelas menengah terhadap kaum bangsawan yang memegang kekuasaan mengakibatkan perluasan hak pilih rakyat. Faktor kelima adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik.

Surbakti menyebutkan dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi-rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang, yakni kesadaran politik seseorang dan kepercayaan politik terhadap pemerintah.¹⁸ Aspek kesadaran politik seseorang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara baik hak-hak politik, ekonomi, maupun hak mendapat jaminan sosial dan hukum. Selain itu, kewajibannya sebagai warga negara dalam sistem politik maupun kehidupan sosial juga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya partisipasi politik. Faktor pertama tersebut sebenarnya juga menyangkut seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang akan lingkungan masyarakat dan politik di sekitarnya.

¹⁸ Sudjono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik...*, 91

Faktor kedua menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-kebijakan maupun terhadap pelaksanaan pemerintahannya. Penilaian itu merupakan rangkaian dari kepercayaannya, baik yang menyangkut apakah pemerintah itu dapat dipercaya atau tidak, maupun apakah pemerintah dapat dipengaruhi atau tidak. Artinya, jika mereka memandang pemerintah tidak dapat dipengaruhi dalam proses pengambilan keputusan politik, maka bagi mereka berpartisipasi secara aktif adalah hal yang sia-sia.

Selain kedua variabel di atas, terdapat variabel lain yang ikut mempengaruhi partisipasi politik seseorang, seperti status sosial dan ekonomi. Kedudukan sosial tertentu, misalnya orang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang tinggi dalam masyarakat akan memiliki tingkat partisipasi politik yang cenderung lebih tinggi. Demikian pula orang yang memiliki status ekonomi yang tinggi cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi politik. Variabel lainnya ialah afiliasi politik orang tuanya dan pengalaman-pengalaman organisasi yang dimilikinya.

Sementara itu Milbrath memberikan empat alasan bervariasinya partisipasi politik seseorang.¹⁹ Pertama, berkenaan dengan penerimaan perangsang politik. Milbrath mengatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi, dan melalui media massa akan berpengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik. Keterbukaan dan kepekaannya menerima perangsang politik melalui media massa akan mendorong seseorang secara aktif terlibat dalam politik. Dengan mengikuti secara aktif perkembangan-perkembangan politik melalui media massa, seseorang

¹⁹ Sudjono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik...*, 92

akan memiliki referensi yang cukup aktual untuk memberikan tanggapan dan akhirnya sebagai bahan dalam partisipasi politiknya.

Meskipun demikian dalam menanggapi perangsang-perangsang politik itu tentu dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, nilai-nilai, pengalaman-pengalaman, dan kepribadian yang dimiliki seseorang. Alasan kedua menurut Milbrath, berkenaan dengan karakteristik sosial seseorang. Status ekonomi, karakter suku, usia, jenis kelamin, dan agama, merupakan karakteristik sosial yang memiliki pengaruh terhadap partisipasi politik.

Ketiga, menyangkut sistem politik dan sistem partai tempat seorang individu itu hidup. Seseorang yang hidup dalam negara demokratis cenderung berpartisipasi dalam politik karena partai-partai politiknya cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa. Sedangkan alasan Milbrath yang keempat ialah berupa perbedaan regional. Perbedaan regional ini merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaan watak dan tingkah laku individu, sehingga mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik seseorang.

Pada masa berlakunya demokrasi konstitusional dan liberal, partisipasi politik masyarakat tergolong tinggi. Partisipasi dalam bentuk-bentuk yang tidak konvensional bahkan seringkali dipilih oleh rakyat dalam menyuarakan aspirasi politiknya. Munculnya partisipasi politik itu tentu tidak dengan sendirinya, tetapi karena faktor yang mendukung lahirnya bentuk partisipasi politik masa itu. Menurut Sanit, ada lima faktor yang mendorong partisipasi politik pada masa itu.²⁰

²⁰ Sudjono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik...*, 95

Pertama, adanya kebebasan berkompetisi di segala bidang, termasuk politik. Kedua, adanya kenyataan berpolitik secara luas dan terbuka. Ketiga, adanya keleluasaan mengorganisasikan diri sehingga organisasi masyarakat dan partai dapat tumbuh dengan subur. Keempat adanya penyebaran sumber daya politik dalam masyarakat. Kelima adanya distribusi kekuasaan dalam masyarakat sehingga tercipta perimbangan kekuasaan.

Dari sejarah politik Indonesia, krisis partisipasi pada prinsipnya disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, adanya logika formal yang menyatakan bahwa infrastruktur politik dibentuk tanpa melibatkan keikutsertaan rakyat, sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh suprastruktur politik dirasakan kurang ada ikatan batin dengan sebagian rakyat. Kedua, setiap keputusan suprastruktur politik harus mengikat dan dipaksakan. Hal itu karena adanya pengkotakan dan aliran sempit (primordial, kesukuan, dsb) yang tidak mendapat respon yang wajar dari rakyat. Ketiga, apatis yang tumbuh dan seringkali disusul dengan manifestasi ekstern berupa separatisme dan demokrasi. Keempat adanya volume tuntutan yang tidak mendapatkan wadah yang cukup dalam suprastruktur politik, sehingga banyak persoalan pembangunan untuk mengembangkan masyarakat menjadi terganggu.

D. Perilaku dalam Pemilihan Kandidat

Secara garis besar pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kandidat untuk dipengaruhi dan diyakinkan agar mendukung dan memberikan suaranya kepada kandidat tersebut.²¹ Pemilih dalam hal ini dapat berupa

²¹ Firmanzah, *Marketing Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 112.

konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik. Di samping itu, pemilih bisa saja merupakan bagian masyarakat luas yang bisa saja tidak menjadi konstituen partai politik tertentu. Masyarakat terdiri dari beragam kelompok. Terdapat kelompok masyarakat yang memang non-partisan, dimana ideologi dan tujuan politik mereka tidak dikaitkan kepada suatu partai politik tertentu. Mereka 'menunggu' sampai ada suatu partai politik yang bisa menawarkan program kerja yang terbaik menurut mereka, sehingga partai tersebutlah yang akan mereka pilih.

Otonomi pemilih menjadi sesuatu yang signifikan. Oleh karena otonomi pemilih itu kembali kepada pandangan, pemikiran, dan perasaan (motivatif), maka peta pertarungan kandidat dalam konteks tersebut mesti menempatkan cara pikir pemilih seperti itu sebagai faktor pokok yang menentukan sukses tidaknya dalam kompetisi politik Pemilu 2017. Yang lebih kompleks, motivasi pemilih itu berubah ubah sesuai dengan kepentingannya. Dalam konteks pemilih, setidaknya bisa dikategorikan dalam ketiga kelompok besar, yaitu kelompok loyalis, kelompok rasional, dan kelompok pragmatis.²² Membaca pemilih kelompok loyalis dan rasional jauh lebih mudah untuk memprediksikan dominasi kandidat. Kelompok loyalis biasanya adalah mereka yang secara ideologis memiliki keberkaitan kuat dengan ideologi dan pandangan politik. Kelompok pemilih rasional adalah mereka yang memiliki kapasitas memandang kandidat dalam konteks visi, misi, dan program kerjanya maupun yang lainnya. Adapun membaca kelompok pemilih pragmatis, jauh

²² Sudjono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik...*, 97

lebih sulit karena motivasi mereka dinamis sesuai dengan kondisi pasar. Kelompok pragmatis adalah kelompok yang berpikir ”berjuang” (beras, baju, dan uang) dalam pilkada, sehingga keuntungan sesaat dijadikan sebagai patokan melakukan pilihan atau perilaku politik.

Perilaku memilih menurut Jack C. Plano adalah dimaksudkan sebagai suatu studi yang memusatkan diri pada bidang yang menggeluti kebiasaan atau kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum, serta latar belakang mengapa mereka melakukan pilihan itu.²³ Dalam dunia politik, ketertarikan pemilih kepada kontestan dapat disebabkan faktor proximity, yaitu pemilih cenderung memberikan suaranya kepada kontestan yang dianggap memiliki kesamaan serta kedekatan sistem nilai dan keyakinan. Secara teoritis, seperti telah dijelaskan sebelumnya. menurut Huntington dan Nelson ada dua model partisipasi pemilih, yaitu partisipasi otonom dan termobilisasi. Dalam kenyataan di negara-negara berkembang perilaku memilih bukan hanya ditentukan oleh pemilih, tetapi dalam banyak hal justru ditentukan oleh tekanan kelompok, intimidasi dan paksaan dari kelompok atau pemimpin tertentu (partisipasi termobilisasi). Hal ini terjadi karena tingkat pendidikan dan kesejahteraan relatif masih rendah sementara beberapa kultural masih berlangsung dengan kuat di masyarakat.

Brennan dan Lomasky menyatakan bahwa keputusan memilih selama pemilu adalah perilaku ‘aksresif’.²⁴ Perilaku ini tidak jauh berbeda dengan perilaku supporter yang memberikan dukungannya pada tim sepakbola. Menurut mereka,

²³ Sofiah R, *Kampanye Politik dan Perilaku Pemilih*, dalam Jurnal Dinamika Vol.5 No.1 tahun 2005, (Surakarta, FISIP Universitas Sebelas Maret, 2005), 18

²⁴ Firmanzah, *Marketing Politik...*, 114

perilaku pemilih sangat dipengaruhi oleh loyalitas dan ideologi. Keputusan untuk memberikan dukungan dan suara tidak akan terjadi apabila tidak terdapat loyalitas pemilih yang cukup tinggi kepada partai politik jagoannya. Begitu juga sebaliknya, pemilih tidak akan memberikan suaranya kalau mereka menganggap bahwa suatu partai politik tidak loyal serta tidak konsisten terhadap janji dan harapan yang telah mereka berikan. Selain itu, perilaku memilih juga syarat dengan kedekatan ideologi antara pemilih dengan partai politik serta memiliki biaya ekonomis berupa sedikit waktu dan usaha.

Kompleksitas, ketaatan, kebimbangan, dan ketidakpastian adalah ciri khas yang selalu hadir pada saat pemilih harus menentukan pilihannya. Selain itu, kebimbangan masyarakat juga dipengaruhi oleh kurangnya kemampuan kontestan dalam memposisikan dirinya atas sebuah permasalahan politik, sehingga pesan politiknya menjadi mengambang dan sukar dipahami masyarakat. Melimpahnya informasi dan pesan politik menjelang kampanye pemilu menyulitkan pemilih untuk mengolah dan menganalisisnya. Di samping itu, informasi yang tersedia sering sekali bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya.

Pengambilan keputusan terfokus pada apakah si pengambil keputusan itu rasional atau tidak rasional. Weber membedakannya menjadi rasionalitas nilai dan rasionalitas tujuan.²⁵ Rasionalitas nilai diartikan sebagai orientasi aksi berdasarkan suatu nilai apakah itu etika, moralitas, agama, hal-hal yang bersifat estetika, kesukaan atau asal-usul. Rasionalitas seorang individu dinilai sejauh mana individu

²⁵ Firmanzah, *Marketing Politik...*, 115

tersebut mengambil keputusan atas nilai-nilai yang ia pegang, dan bukan dari tujuan yang hendak dicapai. Rasionalitas tujuan, di sisi lain diartikan sebagai orientasi keputusan dan aksi berdasarkan kesesuaian dengan tujuan akhir, metode pencapaiannya dan konsekuensinya. Individu akan dinilai rasional ketika keputusan dan aksinya mendukung tujuan akhir.

Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.

Banyak masyarakat yang berhak memilih tidak menggunakan hak pilihnya, banyak pula masyarakat bersusah payah menggunakan hak pilih dalam pilkada. Pendekatan pilihan rasional tidak selalu benar karena cukup banyak masyarakat menggunakan hak pilih sebagai kebanggaan psikologis, seperti menunaikan kewajiban sebagai warga negara, menegaskan identitas kelompok dan menunjukkan loyalitas terhadap partai. Sebagian rakyat juga menggunakan hak pilih berdasarkan informasi yang tidak lengkap dan akurat, seperti tradisi, ideologi, dan citra partai/kandidat.

Berdasarkan buku yang berjudul “*An economic theory of democracy*” dari Downs, keputusan memilih berbeda secara signifikan dengan keputusan ekonomi dan komersial pada umumnya.²⁶ Keputusan memilih selama pemilihan umum dapat

²⁶ Firmanzah, *Marketing Politik...*,104

dianalogikan sebagai perilaku pembelian dalam dunia bisnis dan komersial, keputusan pembelian yang salah akan berdampak langsung terhadap subjek dengan kehilangan utilitas barang atau jasa yang dibelinya. Sedangkan keputusan yang salah dalam pemilu tidak memiliki efek langsung bagi si pengambil keputusan, karena keputusan individu tidak akan berarti apa-apa kecuali dalam jumlah besar. Menurut Downs, partisipasi politik lebih dilihat sebagai aksi masing-masing individu untuk mempertahankan dan memperkuat institusi demokrasi.

Menilik ideologi gerakan golput di Indonesia, memang punya sejarah panjang. Gerakan ini lahir pada masa orde baru berkuasa menggelar pemilu 1971 (pemilu pertama) sampai dengan pemilu 1997 (pemilu terakhir). Mereka bersikap golput karena tidak setuju dengan sistem politik yang diterapkan pemerintah orde baru.

Golput dinilai sebagai sikap apatis karena dianggap sebagai tindakan tidak peduli pada persoalan politik yang ada. Rosenberg menyebutkan tiga alasan adanya apatis.²⁷ Alasan pertama bahwa individu memandang aktivitas politik merupakan ancaman terhadap beberapa aspek kehidupannya. Alasan kedua individu menganggap aktivitas politik merupakan kegiatan yang sia-sia belaka. Individu-individu beranggapan bahwa ia tidak akan mungkin dapat mengubah keadaan dan melakukan control politik. Ketiga yaitu ketidakadaan pesaing politik. Hal itu didasarkan atas pemikiran bahwa buah pikiran politik itu tidak menarik baginya dan menganggap bahwa politik itu hanya memberikan kepuasan sedikit dan tidak langsung.

²⁷ Sudjono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik...*, 105

BAB III

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DESA NIGAN

KECAMATAN SEUNAGAN NAGAN RAYA

A. Gambaran Umum Kab.Nagan Raya Kec. Seunagan Desa Nigan

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten yang sedang tumbuh dan berkembang di provinsi Aceh. Kabupaten yang terletak di pesisir pantai-barat selatan ini merupakan hasil pemekaran wilayah dari kabupaten Aceh Barat dan terbentuk secara definitive berdasarkan UU Nomor 4 tahun 2002 dan telah di tetapkan pula Suka Makmue sebagai Ibukota Kabupaten Nagan Raya. Secara geografis, kedudukan Kabupaten Nagan Raya berada pada titik koordinat antara 030.40'-04038' Lintang Utara (LU) dan 960.11-96048' Bujur Timur (BT). Dengan posisi ini, Kabupaten Nagan Raya berbatasan langsung dengan 4 kabupaten lainnya, yaitu Aceh Barat, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Barat Daya. Luas wilayah Kabupaten Nagan Raya mencapai 3.363,72 kilometer persegi (km²) atau setara 5,86 persen dari luas wilayah Provinsi Aceh (57.365,57 km²).¹

Kedudukan Kabupaten Nagan Raya yang berada di lintas jalan nasional di wilayah pantai barat-selatan Aceh, merupakan peluang strategis yang harus didayagunakan secara optimal. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dengan dukungan dari pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat akan berusaha keras menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah barat-selatan. Sedangkan posisi Nagan Raya yang

¹ BPS Nagan Raya Tahun 2016

berbatasan dengan Aceh Tengah dan Gayo Lues, memungkinkan kemitraan lintas daerah dalam menjalin transaksi perdagangan komoditas hasil pertanian, industry pengolahan, pariwisata, jasa, dan lainnya.

Sementara itu, posisi Nagan Raya yang dikelilingi Samudera Indonesia, tepatnya dibagian selatan, terbukanya peluang yang sangat besar untuk mewujudkan arus perputaran orang, barang, dan jasa melalui jalur laut, baik wilayah pantai barat-selatan maupun dengan pusat pemerintahan provinsi Aceh (Banda Aceh) dan Kabupaten Aceh Besar/sabang atau pun ke Sumatera Utara. Untuk mewujudkan peluang tersebut Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah menjajaki kerja sama dengan PT. Pelindo untuk membangun pelabuhan laut multi purphose di Kuala Tripa Kecamatan Tripa Makmur. Hal ini juga didukung dengan potensi sumber daya pesisir dan kekayaan laut yang cukup besar yang apabila dimanfaatkan dengan baik dan berkelanjutan (Sustainable development) dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama nelayan di pesisir dan mendorong kemajuan wilayah pesisir.²

2. Tata Kelola Pemerintahan

Pelaksanaan roda pemerintahan di Kabupaten Nagan Raya awal mulanya ditandai dengan plantikan Pj. Bupati yaitu tepatnya tanggal 22 juli 2002 dan tanggal itu pula sekarang dijadikan sebagai Hari Jadi Kabupaten Nagan Raya. Pada saat tersebut Kabupaten Nagan Raya hanya memiliki 5 kecamatan Induk yaitu Kecamatan Beutong, Seunagan Timur, Seunagan, Kuala dan Darul Makmur. Seiring dengan berjalannya waktu dan untuk menigkatkan pelayanan yang efektif dan efisien

² BPS Nagan Raya Tahun 2016

kepada masyarakat, sampai saat ini telah dimekarkan kecamatan menjadi 10 kecamatan yang di bagi dalam 27 kemukiman dan 222 Gampong/ Desa dan lembaga Eksekutif yang ada di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya, secara susunan organisasi tahun 2012 terdiri dari 16 Dinas, 14 Lembaga teknis (badan dan kantor). Desa Nigan yang menjadi objek lokasi penelitian ini termasuk ke dalam Kecamatan Seunagan.³

Diawal-awal terbentuknya Kabupaten Nagan Raya, untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat Pusat Pemerintahan di terletak di Jeuram Kecamatan Seunagan. Hal ini disebabkan Komplek Perkantoran Suka Makmue belum selesai pembangunannya dan pada Tahun 2008 Pusat Pemerintahan baru mulai pindah ke lokasi yang saat ini kita berada.

Dalam rangka pelaksanan tata kelola pemerintah yang baik khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan ketentuan uadang – undang atau peraturan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah mendapatkan suatu apresiasi teritnggi dari badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yaitu dengan mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih selama 4 kali berturut – turut yaitu sejak tahun 2008-2011. Dan ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi Pemerintah dan seluruh masyarakat Nagan Raya karena dari sekian banyak kabupaten yang ada di pesisir barat Provinsi Aceh, hanya Nagan Raya yang mampu mendapatkan predikat tersebut.

³ BPS Nagan Raya Tahun 2016

3. Kependudukan dan Tenaga Kerja

Penduduk Kabupaten Nagan Raya pada awal terbentuknya tahun 2002 berjumlah 142.519 jiwa. Angka tersebut naik drastis hingga mencapai 145.108 jiwa pada tahun 2004, atau rata – rata naik 0.60 persen/tahun. Namun, pasca tsunami penduduk Nagan Raya menurun yaitu hanya tinggal 124.340 jiwa. Penurunan ini diyakini akibat bencana tsunami, di samping disinyalir sebagian kecil penduduk telah berpindah ke tempat lain, sedangkan pada tahun 2010 penduduk Nagan Raya tercatat berjumlah 139.663 jiwa dan pada tahun 2011 penduduk Nagan Raya berjumlah 142.861 jiwa.⁴

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya terus mengalami penurunan. Dari 26,22 persen pada tahun 2009 turun menjadi 23,38 persen pada tahun 2011. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Nagan Raya berdasarkan pendapatan pada tahun 2011 sejumlah 66.339 orang sehingga angka tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 66,44 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Nagan Raya adalah sebesar 4,74 persen atau sebesar 4.732 orang. Dari angka tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di Kabupaten Nagan Raya sangat banyak dan hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mewujudkan atau menciptakan lapangan kerja yang memadai sehingga diharapkan akan mengurangi angka pengangguran.⁵

⁴ BPS Nagan Raya Tahun 2016

⁵ BPS Nagan Raya Tahun 2016

4. Pembangunan Daerah

Pembangunan Infrastruktur telah dimulai sejak tahun 2003, yang terutama di fokuskan pada pembunganan sarana dan prasarana perkantoran di Suka Makmue serta pembangunan sarana transportasi jalan dan jembatan . dalam mendukung kelancaran transportasi Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya terus melaksanakan pembangunan. Pembangunan jalan kabupaten, baik dengan menggunakan aspal hotmix ataupun dengan peningkatan jalan terus dilaksanakan.

Pada tahun 2012 sepanjang 392,75 km telah dilaksanakan pembangunannya baik yang sumber dananya dari APBK Nagan Raya, APBA, APBN maupun dana Otsus. Sampai dengan saat ini tinggal 17,82 persen atau sepanjang 70,00 km jalan dalam kondisi permukaan tanah. Pembangunan jalan provinsi dan jalan nasional juga harus ditingkatkan. Dimana dari sepanjang 82 km jalan provinsi kondisinya sudah beraspal dan ruas jalan nasional sepanjang 78 km seluruhnya telah beraspal sehingga sangat lancar dan nyaman di lalui pengguna jalan.⁶

Disamping transportasi darat, jalur transportasi laut juga sangat berperan dalam mendukung kelancaran perputaran orang, barang dan jasa. Namun, aktivitas jasa transportasi laut Nagan Raya belum berkembang. Kondisi ini berkaitan erat dengan belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung seperti pelabuhan. Dan kedepan dengan telah ditandatangani kerjasama dengan PT. Pelindo dalam pembangunan Pelabuhan Multi Purphose di Kuala Tripa diharapkan perkembangan transportasi laut akan dapat berkembang dengan baik.

⁶ BPS Nagan Raya Tahun 2016

Pembangunan transportasi udara yaitu Peningkatan Banda Udara Cut Nyak Dien di Gampong Kubang Gajah Kecamatan Kuala Pesisir terus ditingkatkan dari tahun ke tahun guna mewujudkan keinginan masyarakat berpergian dari Nagan Raya ke luar daerah, atau sebaliknya. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, pada tahun 2012 dan juga pada dalam tahun 2013 ini telah menyediakan anggaran dalam rangka pengadaan tanah untuk perpanjangan landasan pacu Bandara Cut Nyak Dien dan juga pembangunan sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Pekembangan teknologi informasi, belum sepenuhnya terwujud di Nagan Raya. Layanan internet sebagai kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi yang aktual dan cepat relative belum berkembang di daerah ini. Minimnya dukungan infrastruktur teknologi informasi, disamping belum berkembangnya investasi dunia usaha/swasta di sector tersebut merupakan penyebab terbatasnya layanan internet. Sebaliknya, layanan komunikasi berupa telepon seluler/handphone sudah menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Nagan Raya.⁷

Pelayanan listrik di Kabupaten Nagan Raya dikelola PT. PLN (Persero) Wilayah I-Cabang Meulaboh. Selain berasal dari system kelistrikan tertutup yang berasal dari PLTD, pasokan listrik diwilayah barat dan selatan, termasuk Kabupaten Nagan Raya mendapatkan bantuan pasokan dari pembangkit listrik tenaga uap milik Media Group dengan kapasitas 15 MW. Pasokan listrik dari PLTU tersebut selama kurun waktu dua tahun terakhir berjalan normal.

Untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan listrik dari tahun ke tahun kian meningkat, Pemerintah dalam hal ini PT. PLN Persero telah selesai membangun

⁷ BPS Nagan Raya Tahun 2016

OLTU 2 x 110 Mega Watt (MW) di Suak Puntong, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya dan telah mulai beroperasi sejak Januari 2013 yang lalu. Pembangunan PLTU Nagan Raya diwujudkan untuk mendukung stabilitasi distribusi antara wilayah pantai timur, tengah, dan pantai barat, serta wilayah selatan Aceh.

5. Pembangunan Sektor Ekonomi

Selain pembangunan pada sektor infrastruktur, pembangunan sektor ekonomi telah pula menunjukkan keberhasilan yang cukup besar. Pembangunan sektor ekonomi diarahkan pada subsektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan industri serta perdagangan. Kabupaten Nagan Raya mempunyai lahan baku sawah mencapai 18.895 ha dengan tingkat produktivitas mencapai 4,6 ton/ha. Untuk meningkatkan kualitas mutu beras, telah pula dibangun 1 (satu) unit kilang padi modern yaitu RMP di Komplek BBU Pulo Ie kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Disamping pertanian padi sawah, tanaman hortikultura lainnya juga tidak luput dari pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan.⁸

Selain pembangunan pada sektor pertanian, sektor perkebunan juga menjadi salah satu produk unggulan/andalan Kabupaten Nagan Raya yaitu komoditi kelapa sawit, kelapa dalam, karet, kopi, kakao, buah naga dan nilam. Khusus untuk komoditas kelapa sawit, di Kabupaten Nagan Raya terdapat 17 buah perusahaan yang menanamkan modalnya baik PMDN atau pun PMA dengan luas areal mencapai 72.420 Ha dengan produksi mencapai 280.164 Ton/Tahun Tandan Buah Segar (TBS) .

⁸ BPS Nagan Raya Tahun 2016

Pabrik Kelapa Saeit (PKS) yang terdapat di Nagan Raya sejumlah 5 (lima) unit dengan produksi CPO mencapai 34.926 Ton/Tahun.

Sedangkan Luas perkebunan rakyat untuk komoditi kelapa sawit yang tersebar di semua kecamatan dalam kabupaten Nagan Raya mencapai 38.649 ha dengan produksi mencapai 141.561 ton/tahun. Perkebunan komoditi karet di kabupaten Nagan Raya, dengan luas areal mencapai 8.300,5 ha dengan produksi mencapai 3.631,9 ton/tahun. Komoditi kakao/coklat di Kabupaten Nagan Raya mempunyai luas perkebunan coklat 2.498 Ha, sementara produksinya 569 ton/tahun. Tanaman buah naga di Kabupaten Nagan Raya cukup menjanjikan, karena buah naga merupakan komoditi yang sangat berguna bagi protein tubuh dan kesehatan. Saat ini pengembangan buah naga terdapat di Kecamatan Kuala Pesisir dengan luas areal mencapai 20 Ha.⁹

Pada sektor perikanan dan kelautan Kabupaten Nagan Raya mempunyai panjang garis pantai lebih kurang 74,4 Km yang diperuntukkan bagi perikanan tangkap. Untuk memudahkan bagi nelayan telah pula dibangun 1 (satu) unit PPI di Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir. Perikanan darat dititik baratkan pada pengembangan kolam ikan air tawar dan juga pengembangan Balai Benih Ikan yang terdapat di Kecamatan Beutong dan Kecamatan Seunagan.

Pembangunan sektor peternakan dititik baratkan pada komoditi sapi dan kerbau, yang diarahkan untuk memenuhi swasembada kebutuhan konsumsi ternak di Kabupaten Nagan Raya dan Provinsi Aceh. Jenis komoditi ternak yang menjadi

⁹ BPS Nagan Raya Tahun 2016

produk unggulan di Kabupaten Nagan Raya adalah ternak sapi, kerbau, itik dan kambing.

Sapi potong merupakan komoditi unggulan yang cukup potensial dikembangkan di Kabupaten Nagan Raya. Melalui APBD provinsi dan APBD Kabupaten sejak tahun 2004 sampai sekarang telah mengalokasikan dana sebesar ± 3.4 milyar untuk pengembangan Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Padang Turi sebagai pusat penggemukan dan pembibitan serta sarana pendidikan dan penelitian bagi masyarakat peternak dan petani serta mahasiswa.

Kabupaten Nagan Raya mempunyai potensi sumber daya hutan dengan keanekaragaman hayati yang cukup tinggi yang dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat apabila dikelola dengan baik dan bijaksana. Kabupaten Nagan Raya memiliki wilayah hutan 156.449,10 ha, didalamnya terdapat hutan lindung 74.335 ha, hutan produksi tetap 14.750, hutan produksinya terbatas 26.657 ha, hutan yang dapat dikonversikan 20.294 ha serta hutan rakyat 20.413 ha.¹⁰

Sektor pertambangan di Kabupaten Nagan Raya mempunyai potensi yang cukup besar yaitu Batubara, Emas, Grabit dan lainnya. Khusus Batubara saat ini telah ada 1 perusahaan yang melakukan eksploitasi dari beberapa perusahaan yang telah memiliki izin eksplorasi. Sedangkan pada sumber bahan tambang emas, masih dalam tahap eksplorasi.

Pengembangan sektor industri di Kabupaten Nagan Raya diarahkan pada tiga sasaran pokok, yaitu pengembangan industri kecil, industri menengah dan industri

¹⁰ BPS Nagan Raya Tahun 2016

besar. Industri kecil merupakan kegiatan strategi untuk menyerap lapangan kerja disektor informal. Termasuk dalam industri kecil adalah kerajinan bamboo dan kerajinan kasab. Hingga kini belum banyak investor yang secara komersial bermitra secara saling menguntungkan. Maka program kemitraan dengan industri kecil yang didasarkan atas prinsip – prinsip profit oriented merupakan peluang investasi yang cukup cerah.

Industri menengah juga masih belum juga mendapatkan perhatian dari para investor. Memang telah ada beberapa lembaga perbankan yang memberikan modal usaha pada industri menengah seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Akan tetapi modal usaha yang diberikan oleh pihak perbankan belum cukup memadai untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pemasaran adalah industri gergajian, industri remiling karet, pengolahan ikan .

Sector Pendidikan, Kesehatan Sosial, Budaya dan Agama

Pembangunan sektor sosial, Budaya dan Agama yang telah dilaksanakan meliputi pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, syariat islam dan social budaya lainnya serta transmigrasi. Pembangunan pendidikan di fokuskan pada peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan sarana prasarana lainnya. Jumlah sekolah di Kabupaten Nagan Raya, yang terdiri dari SD sejumlah 129 Unit, SLTP 31 Unit, SLTA 17 Unit, SMK 2 Unit dengan tenaga pendidik sejumlah 2.842 orang.¹¹

Pada sektor kesehatan Kabupaten Nagan Raya telah memiliki 1 unit Rumah Sakit Umum Daerah yang sekarang berganti nama menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang terdapat di ujung Patihah Kec. Kuala. Pembangunan RSUD

¹¹ BPS Nagan Raya Tahun 2016

tersebut atas kerja sama Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) dan Caritas Switzerland pada tahun 2008. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 12 unit. Pembangunan sektor sosial lainnya di arahkan pada pembangunan sarana dan prasarana peribadatan dan social masyarakat.

Pembangunan Transmigrasi di Kabupaten Nagan Raya telah ada sejak wilayah ini masih bergabung dengan Aceh Barat. Penempatan Transmigrasi dimulai sejak tahun 1980 s/d 1988 dengan jumlah sebanyak 4.730 KK atau 20.382 jiwa yang tersebar di 12 UPT. Pasca konflik warga transmigrasi yang kembali ke lokasi sejumlah 2.496 KK atau 8.818 jiwa. Kedepan dalam rangka pengembangan transmigrasi baik Translok atau Trans umum, Kabupaten Nagan Raya masih tersedia areal seluas 10.035 Ha. Prioritas Pengembangan Transmigrasi untuk tahun 2014 dan 2015 terdapat 4 lokasi pengembangan yaitu Keutubong Tunong Desa Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur, Gampong Blang Meurandeh/Alue Batee Nuasah, Gampong Babah Suak/krueng Sangoi dan Gampong Blang Puuk/jagong Jeget Kec. Beutong Ateuh Banggalang.¹²

B. Respon Politik Masyarakat Desa Nigan.

Terwujudnya pilkada 2017 tidak terlepas dari peran dan dukungan setiap element masyarakat di setiap daerah. Meskipun dukungan suara dari daerah terpencil. Desa Nigan bisa dikatakan bukan daerah yang terpencil dan buka pula daerah yang sudah sangat maju. Namun desa yang terletak di antara ke dua opsi tadi.

¹² BPS Nagan Raya Tahun 2016

Pada desa ini masyarakatnya antusias dalam mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan politik di pemilu 2017. Hal ini tercermin dari beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan, salah satunya seperti yang dituturkan oleh Bapak Keuchik desa Nigan, beliau menyebutkan tentang respon serta antusiasme masyarakat desa Nigan:

“saya sangat mendukung kesuksesan pilkada 2017 ini. Respon warga saya juga cukup sangat baik dan rata-rata aktif semuanya kecuali yang lanjut usia”.¹³

Menurut Bapak Khaidir ini yang memiliki jabatan sebagai Geuchik gampoeng masyarakatnya menaruh respon positif dalam menyambut pemilihan Bupati 2017 lalu. Hal tersebut dibuktikan dengan semua pihak menyukseskan laju jalannya pilkada di Desa Nigan Kabupaten Nagan Raya. Senada dengan hal tersebut, seorang warga yang bernama Nawawi menyampaikan hal serupa:

“Respon masyarakat sangat antusias mengikuti pilkada tahun ini, bahkan sepengetahuan saya tidak ada yang golput, semuanya ikut memilih baik tua ataupun muda”.¹⁴

Selain berpartisipasi dan mendukung jalannya alur pesta demokrasi tersebut, masyarakat Desa Nigan juga menjaga keamanan dan ketertiban berjalannya kegiatan itu, dan kondisi ini dibuktikan dengan terjaganya keamanan yang baik di tiap TPS sebagaimana yang disampaikan oleh Komisioner KIP Nagan Raya yang berinisial Firdaus, yaitu:

“Dengan jumlah keseluruhan pemilih sekitar 836 orang, maka ada 2 TPS di Desa Nigan, kami selaku KIP bekerja dengan sangat baik dan masyarakat desa Nigan juga

¹³ Wawancara pada 10 November dengan Geuchik Desa Nigan Bapak Khaidir.

¹⁴ Wawancara pada 10 November dengan warga Desa Nigan Kab. Nagan Raya dengan Bapak Nawawi

sangat membantu, bahkan keamanannya juga terjaga dengan sangat baik dan ketat apalagi disaksikan langsung oleh warga setempat”¹⁵.

Perilaku golput (golongan putih atau warga yang apatis) yang sering dikhawatirkan muncul apalagi di desa kecil seperti Desa Nigan malah tidak muncul. Memang benar, bahwa Golput dinilai sebagai sikap apatis karena dianggap sebagai tindakan tidak peduli pada persoalan politik yang ada. Rosenberg menyebutkan tiga alasan adanya apatis.¹⁶ Alasan pertama bahwa individu memandang aktivitas politik merupakan ancaman terhadap beberapa aspek kehidupannya. Alasan kedua individu menganggap aktivitas politik merupakan kegiatan yang sia-sia belaka. Individu-individu beranggapan bahwa ia tidak akan mungkin dapat mengubah keadaan dan melakukan control politik. Ketiga yaitu ketidakadaan pesaing politik. Dan ketiga hal yang disampaikan oleh Rosenberg ini tidak terjadi di Desa Nigan.

Bahkan ada petugas partai yang menyatakan hampir sebagian besar warga Desa Nigan merupakan tokoh atau kader suatu partai:

“sebagian warga baik yang muda-muda atau yang sudah berumur adalah anggota partai saya, dan partai ini merupakan partai yang menang telak di Desa Nigan”¹⁷

Maka dari paparan data yang peneliti himpun dan observasi yang peneliti lakukan, dapat diketahui, bahwa respon masyarakat, tokoh masyarakat hampir semuanya menaruh respon positif untuk sukses terlaksananya Pilkada 2017 di Desa Nigan Kab. Nagan Raya.¹⁸

¹⁵ Wawancara pada 10 November dengan Komisioner KIP Kab.Nagan Raya, Bapak Firdaus.

¹⁶ Sudjono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik...*, hlm.105

¹⁷ Wawancara pada 10 November dengan Tokoh Partai, Bapak Salahuddin.

¹⁸ Hasil Observasi Tanggal 10-11 di Desa Nigan Kabupaten Nagan Raya.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II di atas bahwa dalam partisipasi politik ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi di antaranya adalah; tingkat pengetahuan, pekerjaan masyarakat, tingkat pendidikan, peran aparat pemerintahan (tokoh partai), peran kaum intelektual, peran media, dan konflik antara para petinggi politik. Sayangnya para ahli jarang menyebutkan tentang rasionalitas masyarakat dalam menilai. Dan setelah melakukan observasi serta wawancara dengan ragam kalangan masyarakat, peneliti menganggap di tahun 2017 ini, masyarakat semakin terdidik dan pintar dalam menilai peta politik yang dimainkan setiap pemilu meskipun mereka adalah masyarakat desa.

Peneliti tidak sedang mencoba meninggikan dan membanggakan kondisi masyarakat desa peneliti sendiri, tapi menurut peneliti, masyarakat Desa Nigan Kabupaten Nagan Raya telah cerdas dalam menyikapi, menilai sehingga memilih untuk berpartisipasi dalam pilkada tahun 2017 tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan data dan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, persentasenya dapat dilihat lebih kurang dalam table berikut ini:

Jumlah DPT	Suara Sah	Suara Rusak	Golput	Keterangan
750 Orang	710 Orang	13 Orang	27	Golput karena Faktor Usia (Lansia)

Sosialisasi dan pendidikan politik yang diberikan oleh lembaga sosial atau pihak terkait lainnya dalam meningkatkan partisipasi politik ternyata tidak lantas

mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi politik secara maksimal. Sehingga dalam hal ini peneliti melihat dari sisi lain mengenai pengaruh rasionalitas pemilih dalam partisipasi politik. Terlepas dari pemahaman manusia sebagai makhluk sosial, pada dasarnya manusia merupakan makhluk individu. Makhluk individu memiliki tingkat rasionalitas yang sangat tinggi. Sifat dasar dari makhluk rasional adalah kalkulasi untung rugi yang menjadi dasar setiap tindakannya. Hampir semua manusia akan berusaha mendapatkan barang yang dia inginkan dengan ongkos seminimal mungkin.¹⁹ Barang dalam hal ini memiliki pengertian yang sangat luas. Tidak hanya barang yang berwujud namun juga barang yang tidak berwujud seperti misalnya sebuah kebijakan atau perjanjian. Sedangkan ongkos dalam hal ini tidak selalu berhubungan dengan uang, namun juga termasuk waktu dan tenaga.

Hubungannya dengan Pemilu, rasionalitas masyarakat muncul ketika mereka berfikir keuntungan apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka menggunakan hak pilihnya. Padahal disisi lain mereka sudah jelas mengeluarkan ongkos dalam Pemilu. Ongkos dalam hal ini sudah pasti tenaga dan waktu, bahkan bisa jadi uang. Misalnya untuk transportasi menuju TPS. Masyarakat mulai berfikir apakah barang yang mereka dapatkan nantinya sebanding dengan ongkos yang mereka keluarkan. Hasil Pemilu merupakan sebuah barang ketika hasil tersebut telah berubah menjadi sebuah keputusan yang telah ditetapkan oleh KPU. Namun dalam hal ini apakah barang hasil Pemilu tersebut telah memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat.

Bagi masyarakat keuntungan hanya didapat oleh calon yang terpilih, sedangkan dampak langsung bagi mereka tidak mereka dapatkan. Dalam Pilkada

¹⁹ Sudjiono Sastroadmojo, *Perilaku Politik*, (Semarang, IKIP Semarang Press, 2015), hlm.56

2017 di Desa Nigan menunjukkan fakta adanya peningkatan partisipasi politik. Peningkatan tersebut namun tidak lantas menjadi kabar bahagia bagi pemerintah khususnya atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan partisipasi politik. Karena pada kenyataannya saat ini sangat marak berkembang fenomena politik uang atau lebih dikenal dengan istilah *money politic* dalam Pilkada.

Praktik *money politic* dalam Pemilu dapat dilihat dari pandangan teori pilihan rasional. Salah satu tokoh teori pilihan rasional yang terkenal adalah James S. Coleman. Coleman menganggap bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang dipengaruhi oleh tujuan dan nilai yang diinginkan oleh mereka.²⁰ Selanjutnya menurut Coleman dalam teori pilihan rasional ada dua unsur yang terlibat yakni aktor dan sumber daya. Uang menjadi salah satu motivasi bagi seseorang untuk berpartisipasi dalam politik. Dalam pilkada sendiri yang dinamakan aktor adalah masyarakat dan para calon kepala daerah. Sedangkan sumber daya yang dimaksud adalah uang dan jabatan politik. Coleman menjelaskan adanya interaksi antara aktor dan sumber daya. Masing-masing aktor dapat mengendalikan sumber daya. Baik masyarakat maupun calon dapat mengendalikan jabatan politik. Masyarakat memiliki hak untuk menentukan siapa calon yang akan terpilih. Sedangkan calon juga memiliki kemampuan untuk memengaruhi pilihan masyarakat. Disinilah kemudian kedua aktor tersebut saling memengaruhi dan membutuhkan untuk mencapai tujuan masing-masing.

Masyarakat dan para calon kepala daerah sama-sama memiliki kepentingan terhadap sumber daya yakni uang dan jabatan politik keduanya sehingga dapat saling

²⁰ James S. Coleman, *Teori-Teori Ilmu Sosial*, Terj. Budi Raharjo (Jakarta: Aksara Press, 2007), hlm. 47

memengaruhi. Calon memberikan penawaran yang memberikan keuntungan kepada masyarakat. Disisi lain masyarakat memberikan penawaran berupa dukungan suara untuk memenangkan pasangan calon. Masyarakat dan calon akhirnya terlibat sebuah hubungan untuk memenuhi kepentingannya masing-masing. Sehingga praktik politik uangpun tidak dapat terhindarkan. Hak pilih menjadi sesuatu yang bisa ditukar dengan rupiah. Dengan adanya transaksi tersebut maka kedua aktor ini akan sama-sama mendapatkan sumber daya yang mereka inginkan. Dimana pemilih dalam hal ini akan mendapatkan uang sedangkan calon akan mendapatkan jabatan politik yakni berupa kemenangan dalam pilkada.

Hasil amatan peneliti, yang sebelumnya berawal dari sebuah sikap kekhawatiran akan terjadinya praktik *money politic* terbantahkan setelah terjun langsung di lapangan dalam mewawancarai masyarakat atau tokoh terkait lainnya. Partisipasi masyarakat Desa Nigan dalam pilkada 2017 lalu bukan dilandasi oleh iming-iming *money politic*, akan tetapi lebih kepada kesadaran bersama yang berhasil dibangun oleh masyarakat itu sendiri.²¹ Hal ini juga sebagaimana yang disampaikan oleh informan yang merupakan Geuchik gampong setempat yang Bapak Khaidir:

“Setau saya tidak ada praktik *money politic* di Desa Nigan, jikapun ada mungkin secara tertutup tanpa diketahui oleh publik. Tapi saya rasa itu tidak mungkin, mengingat saya telah menjadi geuchik sudah sangat lama di sini, kali ini masyarakat semakin cerdas dan semakin paham, mereka telah mampu menilai sendiri mana pemimpin yang layak dan patut untuk dipilih, sebab bicara memilih pemimpin ini bukan hanya soalan bicara isi perut hari ini atau esok lusa, tapi bicara masa depan bertahun-tahun akan datang yang akan dinikmati oleh anak cucu”.²²

²¹ Hasil Observasi Tanggal 10-11 November 2017 di Desa NIGan Kabupaten Nagan Raya

²² Wawancara pada 10 November dengan Geuchik Desa Nigan, Bapak Khaidir.

Pernyataan ini juga diperkuat oleh pengakuan masyarakat lainnya, misal seperti pengakuan seorang ibu Rumah Tangga yang berinisial Aslinda:

“Tidak ada tokoh partai atau timses calon yang datang ke desa kami untuk membagi-bagikan uang atau barang lainnya, yang ada hanya ajakan dan seruan untuk mengikuti kampanye di lapangan atau tempat-tempat kampanye, biasanya ini dilaksanakan di kecamatan, sehingga semua masyarakat dari berbagai desa ikut ke sana”.²³

Keikutsertaan dari masyarakat untuk menjadi timses juga menjadi sebuah faktor yang akurat dalam kegiatan partisipasi masyarakat. Karena dalam hal ini, masyarakat bukan hanya menjadi penonton dan pemilih saja, tapi juga menjadi aktor di dalamnya. Walaupun masyarakat yang menjadi timses ini menyerukan untuk memilih kandidat yang diusung partainya, namun bukan hanya menjadi sebuah perlombaan di sana, tapi secara langsung telah menjadi media berjalan yang mensosialisasikan kepada masyarakat untuk memilih. Dan dalam hal ini peneliti mendapati, bahwa di Desa Nigan ternyata suaranya penuh dan tidak terpecah kepada calon-calon yang lain, tapi masyarakatnya memilih satu calon secara serempak. Dan hal ini bukan dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Terkait hal ini terbukti dengan adanya penegasan dari salah seorang warga yang juga merupakan timses calon, menurut Bapak Naufal tidak ada paksaan dalam memilih siapapun, namun karena masyarakat sudah dapat menilai sendiri, maka yang terpilih dan merupakan suara mutlak untuk satu calon tersebut adalah kesadaran masyarakatnya yang telah melihat dan menilai bahwa si calon memang layak untuk dipilih.

²³ Wawancara pada 10 November dengan warga, Ibu Aslinda.

“Tidak ada pemberian uang dan barang yang saya lihat dalam pilkada kali ini, dulu jikapun ada tertutup, tapi di daerah kami tidak ada, saya dan keluarga serta teman-teman tidak pernah menerimanya.”²⁴

Dari beberapa pernyataan warga dan hasil amatan peneliti, maka peneliti berkesimpulan bahwa, di tahun 2017 ini, meskipun mungkin ada partisipasi politik warga yang dilator belakang oleh pengaruh pemberian uang atau barang dan sebagainya, namun di Desa Nigan kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya bersih dari praktek money politic tersebut. Dan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi warga masyarakat dalam berpartisipasi adalah pengaruh kesadaran, sosialisasi yang baik serta tingkat kecerdasan warga yang telah pandai dalam menilai dan menyikapi peta politik yang terjadi di tahun 2017.

²⁴ Wawancara pada 10 November dengan warga, Bapak Naufal.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang muncul dari penelitian ini, peneliti telah sampai pada suatu kesimpulan yang pasti setelah meneliti, melakukan observasi dan menerapkan instrument penelitian lainnya di lapangan, yaitu:

1. Respon masyarakat desa Nigan Kabupaten Nagan Raya dalam pilkada 2017 lalu sangat baik. Masyarakat Desa Nigan antusias dalam menjadi bagian dari pesta demokrasi tersebut. Memang sulit dan jarang mendapati sebuah daerah dengan respon yang demikian, namun seiring dengan waktu, masyarakat tercerahkan untuk memberikan respon positif kepada sesuatu yang juga bersifat positif untuk membangun daerahnya, membangun bangsanya, dan itu juga diawali dengan membangun kesadaran berpolitik yang baik dengan memberikan respon-respon yang baik dalam perpolitikan.
2. Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat desa Nigan Kabupaten Nagan Raya dalam pilkada 2017 yang paling tinggi adalah faktor kesadaran masyarakat. dan tidak didapati adanya praktik *money politic* walaupun tidak dapat di sangkal bahwa di beberapa daerah lainnya praktik bagi bagi uang dan janji-janji muluk tersebut masih dibudayakan, dan dianggap wajar. Namun masyarakat desa Nigan kesadaran berpolitiknya cukup tinggi, hal tersebut juga dikarenakan banyak

masyarakatnya merupakan bagian dari timses suatu calon. Kesadaran berpolitik inilah yang telah terbangun di Desa Nigan Kabupaten Nagan Raya.

B. Saran-saran

Penulis berharap semoga penelitian skripsi ini menjadi sebuah pembelajaran yang berharga untuk kita semua, masyarakat Aceh pada umumnya dan rakyat Indonesia secara khususnya, untuk lebih cerdas dan memiliki kesadaran yang tinggi dalam perilaku dan berpartisipasi politik. Karena memilih pemimpin adalah tanggung jawab kita semua yang manfaat serta akibatnya juga akan menjadi bagian diri kita.

Penulis juga menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penelitian ini, semoga kritik dan saran membangun dapat menjadi penyemangat untuk memperbaiki di waktu yang akan datang.

Terakhir, semoga penelitian ini ada manfaatnya dan menjadi bahan kajian untuk penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Said Gatara, dan Mohd. Dzulkiah Said, *Sosiologi politik: konsep dan dinamika perkembangan kajian*, Jakarta: Grafindo Persada, 2007
- Anis Pujining Rahayu, “*partisipasi politik masyarakat dalam pilkada(2008) kota malang*”.(jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2009).
- Firmanzah, *Marketing Politik*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007
- James S. Coleman, *Teori-Teori Ilmu Sosial*, Terj. Budi Raharjo, Jakarta: Aksara Press, 2007
- John W. Best, *Research in Education*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982
- Lexi J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- Laelah kodariah “*partisipasi politik siswa MAN II yogyakarta dalam pemilukada tahun 2011 di kota yogyakarta*”. fakultas syariah dan hukum UIN sunan kalijaga yogyakarta
- Mas’oed, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001
- Marlini Tarigan, “*partisipasi masyarakat kabupaten Tamanggung dalam pelaksanaan pilkada tahun 2008*” (Program studi magister ilmu politik, Program pasca sarjana Universitas Depongoro Semarang, 2009).
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohindi, Jakarta: UI Pers, 1992
- Miriam Budiardjo, *Partisipasi Politik*, Jakarta: PT Gramedia. 1998
- _____ Budiardjo, “*Partisipasi dan partai politik sebuah bunga rampai*”. Jakarta yayasan obor indonesia 1998
- _____ Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008
- _____, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2013
- Moh. Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006

- Muhammad musthofa “*peran dan partisipasi pergerakan perempuan kebangkitan bangsa (PPKB) di DPRD D.I.periode 2009-2014*”. (fakultas syariah dan hukum UIN sunan kalijaga yogyakarta).
- Muhammad Mukhlisin (2011) “*Hubungan antara persepsi terhadap politik dengan minat partisipasi politik pada siswa kelas X SMA N 1(teladan) yogyakarta*”.
- Omta purba, “*Hubungan Tingkat Kesadaran Politik dengan partisipasi politik masyarakat pada kegiatan Pemilukada 2010 di kelurahan Timbangan kecamatan Inderalaya Utara Kabupaten Ogan Ilir*”.(Fakultas ilmu Sosial dan ilmu politik Universitas Sriwijaya).
- Pawito, *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan*, Yogyakarta, Unname, 2009
- Rusdin Pohan, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Rijal Institute, 2007
- Samuel p. Hungtinton dan joan nelson, “*partisipasi politik di negara berkembang*”.Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Sanafiah Faisal dan Mulyadi Guntur W, *Metodologi Penelitian dan Pendidikan*, terj.
- Sofiah R, *Kampanye Politik dan Perilaku Pemilih*, dalam Jurnal Dinamika Vol.5 No.1 tahun 2005, Surakarta , FISIP Universitas Sebelas Maret, 2005
- Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Praktes)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2002
- Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, Semarang. IKIP Semarang Press, 1995
- Sudjono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, Semarang, IKIP Semarang, 1995
- Wawancara pada 10 November dengan Geuchik Desa Nigan Bapak KHA.
- Wawancara pada 10 November dengan warga Desa Nigan Kab.Nagan Raya dengan Bapak NA
- Wawancara pada 10 November dengan Komisioner KIP Desa Nigan Kab.Nagan Raya, Bapak FIR.
- Wawancara pada 10 November dengan Tokoh Partai, Bapak SAL.

Wawancara pada 10 November dengan warga, Ibu AS.

Wawancara pada 10 November dengan warga, Bapak NWW.

[www.kopertis4.or.id/aturan/undang-undang Pemerintah dan daerah/No. 32 th 2004 tentang Pemerintahan Daerah](http://www.kopertis4.or.id/aturan/undang-undang-Pemerintah-dan-daerah/No.32-th-2004-tentang-Pemerintahan-Daerah).

INSTRUMENT PENELITIAN

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KABUPATEN NAGAN RAYA KEC. SEUNAGAN DESA NIGAN DALAM PEMILUKADA 2017.

Pedoman Wawancara:

A. Pertanyaan Untuk Tokoh Partai:

Nama Responden :

Alamat :

Umur :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

1. Sebagai Pemilih bagaimana Saudara melihat respon masyarakat dalam menyambut pemilukada tahun 2017 ini ?
2. Lalu bagaimana saudara melihat respon pemilih menyambut pemilukada 2017 ini ?
3. Bagaimana caranya saudara mengajak pemilih bergabung dengan partai saudara untuk mendukung salah satu paslon tertentu?
4. Apakah ada pemilih yang menjadi anggota / pengurus di partai anda ?
5. Bagaimanan kinerja pemilih dalam partai ?
6. Dalam Partai saudara apakah ada pemilih yang menjadi juru kampanye di Desa Nigan Kabupaten Seunagan?
7. Apakah saudara mendapatkan saksi-saksi pemilih dalam TPS ?
8. Dalam perhitungan suara, calon dari partai anda menduduki posisi urutan ke berapa?
9. Apakah partai anda ada memberikan sumbangan dalam bentuk apapun terhadap calon pemilih di Desa Nigan ?

B. Pertanyaan untuk tokoh Masyarakat/Geuchik:

Nama Responden :

Alamat :

Umur :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

1. Sebagai Tokoh Masyarakat, Apakah Bapak mendukung adanya pemilukada kali ini?
2. Menurut penilaian Bapak bagaimana kalangan pemilih desa Nigan Merespon Pemilu kali ini?
3. Apakah Bapak melihat adanya pemilih yang aktif dalam kegiatan pemilukada tahun 2017 di desa nigan ini ?
4. Kegiatan apa saja yang dilakukan pemilih dalam kegiatan pemilukada 2017 di desa Nigan ini ?
5. Apakah ada Pemilih dari desa nigan ini yang mencalonkan diri untuk menjadi calon di pemilu 2017 ini ?
6. Dalam proses perhitungan suara, apakah ada pemilih yang ikut menyaksikan proses perhitungan suara ?
7. Apakah Bapak melihat adanya kondisi money politik dalam pemilukada di Desa Nigan ini?
8. Jika ada, dalam bentuk apa pemberian dari salah satu calon, apakah uang atau benda maupun janji lainnya?

Pertanyaan untuk Kantor KIP

Nama Responden :

Alamat :

Umur :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

Jabatan :

1. Apa saja yang perlu dipersiapkan oleh KIP untuk mempersiapkan pemilukada tahun 2017 di Desa Nigan Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya ini ?
2. Di Setiap TPS Ada berapa jumlah keseluruhan calon pemilih tetap di Desa Nigan pada pemilu tahun 2017 ini ?
3. Ada berapa jumlah TPS dalam pemilu tahun 2017 di Desa Nigan Kec. Seunagan ?
4. Bagaimana perolehan suara di Nesa Nigan Kec. Seunagan?
5. Dalam kegiatan pemungutan ataupun perhitungan suara, apakah keamanan cukup kondusif di Desa Nigan ini ?
6. Bagaimana Peran pemilih dalam menjaga keamanan Pemilukada ?

Pertanyaan Untuk Masyarakat :

Nama Responden :

Alamat :

Umur :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

1. Sebagai pemilih apa pendapat saudara tentang pemilukada 2017 ini ?
2. Tahukah Saudara ada berapa banyak calon/kandidiat dalam pemilih kali ini?
3. Ada berapa banyak partai yang saudara ketahui yang ikut andil dalam pemilukada di tahun 2107 ini ?
4. Dari mana saudara ketahui hal-hal tersebut ?
5. Partai apa yang saudara sukai? Dan Mengapa ?
6. Apakah saudara memenuhi syarat sebagai pemilih ?
7. Apakah saudara sudah terdaftar sebagai pemilih ?
8. Bagaimana saudara tau bahwa saudara sudah tercatat sebagai pemilih ?
9. Apakah suadara tahu tata cara pemberian suara dalam pemilukada tahun 2017 ini ?
10. Apakah saudara tahu apa itu golput ?
11. Bagaimana tanggapan saudara tentang golput ?
12. Apakah ada saudara / kerabat / teman suadara yang golput ?
13. Jika ada, menurut saudara mengapa mereka golput ?
14. Menurut anda apakah perlu diadakan kampanye ?
15. Dan untuk apa tujuan kampanye tersebut ?
16. Apakah menurut pemantauan saudara ada paksaan untuk memilih salah satu calon tertentu ?
17. Apakah menurut saudara adanya pembagian uang (*money politik*) yang terjadi dalam pemilu kali ini?
18. Jika ada, apakah saudara termasuk salah satu yang menerimanya ?

19. Apakah saudara mengikuti perkembangan pemilu kali ini di media sosial atau media massa ?
20. Apakah saudara kenal dengan calon gubernur yang di usung pada pemilu kali ini ?
21. Apakah ada calon yang saudara jagokan dalam pemilu kali ini ?
22. Apa alasan saudara menjagokan calon tersebut ?
23. Apakah saudara ikut kampanye terbuka setiap calon yang maju dalam pemilu kali ini ?
24. Apakah saudara mengkoordinir masyarakat untuk ikut kampanye dari para calon ?
25. Apakah saudara terlibat dalam panitia penyelenggara pemungutan suara di Desa Nigan ???
26. Apakah saudara menjadi saksi dari calon tertentu dalam proses pemungutan suara ?
27. Apakah saudara melakukan sosialisasi tentang tata cara pemberian suara dalam pemilu tahun 2017 di Desa Nigan ?
28. Apakah saudara memantau/hadir dalam perhitungan suara di Tps desa Nigan ?
29. Apakah saudara ikut menjaga ketertiban terlaksananya pemilu tahun 2017 di Desa Nigan ini ?
30. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendorong keterlibatan saudara dalam proses pemilu tahun 2017 di Desa Nigan ini ?

Pertanyaan Untuk Salah satu Calon atau Kandidat :

Nama Responden :

Alamat :

Umur :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

1. Mengapa Bapak mencalonkan diri dalam pemilukada tahun 2017 ini ?
2. Apa Visi-Misi Bapak secara umum dalam pemilihan kali ini ?
3. Apakah Bapak dan Timses Bapak ada mengadakan kampanye ke beberapa Kecamatan dan Desa di Kabupaten Nagan Raya ini ?
4. Menurut amatan Bapak, bagaimana respon masyarakat saat bapak melakukan kampanye ?
5. Apakah Bapak dan Timses ada memberikan sumbangan dalam bentuk apapun terhadap masyarakat ?
6. Apakah bapak memiliki anggota dari timses Bapak yang berasal dari Desa Nigan Kecamatan Seunagan ?
7. Dan apakah anggota tersebut melakukan tugasnya untuk memobilisasi massa dalam pemilkada tahun 2017 ini ?
8. Dan apakah menurut Bapak kinerjanya berhasil yang dibuktikan dengan diperolehnya suara maksimal untuk memenangkan bapak di Desa Nigan Kec. Seunagan ?
9. Menurut amatan Bapak, apakah masyarakat antusias untuk mengikuti pemilukada tahun 2017 ini ?



Gambar 1.1 Photo bersama bapak Keuchik Desa Nigan Kec. Seunangan
Kabupaten Nagan Raya



Gambar 1.2 Photo bersama Ketua Kantor KIP Kab. Nagan Raya



Gambar 1.3 Photo bersama tokoh politik masyarakat Desa Nagan

DAFTARRIWAYAT HIDUP

1. IdentitasDiri:

Nama :Rahmat Mulia
Tempat/Tgl.Lahir :Nigan,18 Oktober 1996
Jenis Kelamin :Laki-laki
Pekerjaan/Nim :Mahasiswa/361 303 527
Agama :Islam
Kebangsaan :Indonesia
Fakultas/Jurusan :Ushuluddin dan Filsafat/SosiologiAgama
AlamatSekarang :Jl,Rukoh utama, Desa Rukoh

2. DataOrangTua:

NamaAyah :Marhaban
Pekerjaan :Petani
NamaIbu :Radiyah
Pekerjaan :IbuRumahTangga

3. RiwayatPendidikan:

- A. SDN.1 Nigan,Tamat tahun 2007
- B. SMP.1 Jeuram, Tamat tahun 2010
- C. SMAN.1Jeuram, Tamat tahun 2013
- D. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Sosiologi Agama, UIN Ar-Raniry.

4. Prestasi/Penghargaan:

- A. Juara 2 MTQ tingkat kemukiman desa blang puuk Nigan tahun 2014
- B. Piagam penghargaan photography hunting 5 Budaya dalam satu lensa tahun 2016

5.Pengalaman Organisasi

Internal :

- A. Anggota HMJ Sosiologi Agama Periode2013-2014.

Eksternal:

- B. Kabid publikasi dan komunikasi GMA Nagan Raya periode 2015-2016